

e-news letter

APR | 2020

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

CEGAH MORAL HAZARD,

**PERKETAT  
PENGAWASAN  
PERPPU COVID-19**



# Perppu Yang Tabu

Regulasi bertaburan, namun justru eksekusi, reaksi dan aksi nampak semakin kabur. Tengok saja data dan angka, jumlah yang terpapar semakin banyak berbanding lurus dengan korban yang meninggal. Belum lagi APD yang sulit ditemukan, bahkan sejumlah RS meminta donasi. Lalu dimana angka-angka yang fantastis itu berkerja efektif?

Peraturan dibuat untuk menghadirkan keterangan sosial (social order). Karenanya proses penyusunan peraturan harus mempertimbangkan sejumlah hal seperti filosofis, yuridis dan sosiologis. Pada prinsipnya keterangan adalah produk interaksi sosial yang berjalan harmonis dan selaras dengan nilai dan norma yang berlaku.

Dalam menanggapi wabah covid pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan sejumlah peraturan, baik dalam PP, Keppres dan Perppu. Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga ditetapkan pada 31 Maret 2020. Ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penebaran Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19.

Regulasi bertaburan, namun justru eksekusi, reaksi dan aksi nampak semakin kabur. Tengok saja data dan angka, jumlah yang terpapar semakin banyak berbanding lurus dengan korban yang meninggal. Belum lagi APD yang sulit ditemukan, bahkan sejumlah RS meminta donasi. Lalu dimana angka-angka yang fantastis itu berkerja efektif? Tidak cukup sampai disitu, ada

sejumlah indikasi free rider (penumpang gelap) dan motif ekonomi invisible hand yang tetap memaksakan kehendak mendompleng sejumlah peraturan yang digagas. Pihak-pihak yang tidak berwujud mereka tidak mau rugi dan paling bersikukuh 'menjual pengaruh' ditengah pandemik yang belum tahu ujungnya. Aneh bin ajaib, ini semua dipentaskan diruang publik yang sedang terpapar.

Interaksi sosial ditentukan oleh kondisi sosial suatu masyarakat yang memperlihatkan adanya tanda-tanda keterangan atau tidak. Peraturan yang dibuat ternyata secara faktual menghasilkan proses interaksi yang disosiatif atau menciptakan kekacauan, dibandingkan proses interaksi asosiatif menciptakan keterangan. Satu sama lain nampak kontradiksi dan melahirkan komplikasi peraturan. Tengok saja dari alokasi anggaran untuk kesehatan seharusnya mendapat porsi lebih besar, namun tidak demikian. Padahal - kami ulang lagi - banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan mengeluhkan kurang dan langkanya APD, masker, serta alat dan bahan lainnya. Belum lagi soal minimnya ruang isolasi di rumah sakit dan dukungan moril yang harus diberikan pada para tenaga kesehatan.



Peraturan yang diluncurkan oleh Pemerintah terkait Covid-19 mengutar sesuatu yang sudah teratur, bahkan dalam beberapa pasal nampak melampaui maksud dari peraturan itu dibuat. Ada sejumlah pasal otoritas tidak mau diatur dan dikritisi. Akhirnya bahkan berujung bui. Kewenangan Pemerintah nampak menguat karena semua tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata (Pasal 27 ayat 1 dan 2), dan semua kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat digugat di PTUN, karena bukan

obyek hukum (pasal 27 ayat 3). Mau sampai kapan ini terjadi? Hingga batas yang belum jelas, mengutip himbauan covid 19. Terlalu.

Peraturan yang dijelontorkan sangat terbuka kemungkinan cela dan moral hazard, ingat kekuasaan yang berlebihan akan berpotensi pada penyalahgunaan. Ungkapan dalil Lord Acton power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely itu tampaknya tepat untuk menggambarkan penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaannya. Waspadalah!

# Cegah Moral Hazard, Johan Usul Perketat Pengawasan Perppu Covid-19

Rancangan perpu tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit tentang pengawasan oleh publik dan DPR sehingga diperlukan Pengawasan Pelaksanaan Perpu Covid-19 dengan ketat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan (Moral Hazard) dan memperkuat mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan perpu tersebut.

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (02/04) — Anggota FPKS DPR RI, Johan Rosihan, memberikan respon pada rancangan Perppu No. 1/2020 yang ternyata belum mengatur tentang mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat tentang pelaksanaan penanganan Covid-19.

Johan menilai pada rancangan perpu tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit tentang pengawasan oleh publik dan DPR sehingga diperlukan Pengawasan

Pelaksanaan Perpu Covid-19 dengan ketat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan (Moral Hazard) dan memperkuat mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan perpu tersebut.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menilai bahwa rancangan perpu Covid-19 memberikan tambahan kewenangan yang sangat besar kepada para menteri dan jajaran terkait. Keadaan ini menurutnya sangat diperlukan mekanisme kontrol yang

eksplisit dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

"Saya tegaskan bahwa koordinasi yang baik antar kementerian dan Lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih terarah dan terlaksana dengan baik", ungkapnya.

Pada rapat internal Komisi IV yang dilakukan secara virtual pada Kamis (02/04/2020), Anggota DPR ini mengkritisi, bahwa Perppu No. 1/2020 memberikan fasilitas kebebasan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor dalam rangka untuk mengatasi Covid-19. Kondisi ini, sangat diperlukan pengawasan khusus dari DPR RI agar kebijakan impor tidak mematickan peluang pengembangan produksi dalam negeri, termasuk riset penemuan vaksin, membangun sektor kesehatan, industry komoditas pangan, dan lain-lain.

"Pengambilan keputusan, pemerintah seharusnya berbasis bukti (evidence based) dan



melibatkan berbagai pakar di bidangnya untuk penanganan pandemic Covid-19", tandas Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menyampaikan bahwa Perpu No. 1/2020 ini membuka tambahan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun. Besarnya anggaran ini, memerlukan pengawasan dan akuntabilitas yang ketat dari tim pengawas DPR RI.

Selanjutnya, Johan menguraikan beberapa contoh bentuk Pengawasan dan Akuntabilitas Perpu yang terkait dengan hajat hidup rakyat banyak adalah seperti Program

Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Baginya, diperlukan pengawasan DPR RI untuk memastikan penerima ekisting 15,2 juta KPM menerima tambahan Rp 50 ribu/bulan selama 9 bulan serta Pengawasan terhadap tambahan 4,8 juta KPM menerima Rp 200ribu/bulan selama 9 bulan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id | Foto : dpr.go.id

# Nasir Djamil: Perppu Nomor 1/2020 Berpotensi Menyuburkan Korupsi

Ada indikasi kalau Perppu ini dirancang dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi virus corona berasal dari pajak dan keringat rakyat. Ada kesan Perppu itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum

## HM. NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI

Aceh (02/04) — Anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PKS, M Nasir Djamil menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak letti saat menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut Nasir Djamil, Pasal 27 dalam Perppu yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona ternyata memberikan keistimewaan kepada pejabat tertentu untuk kebal hukum.

"Padahal hukum secara universal mengutamakan

prinsip "equality before the law" atau setiap orang sama di hadapan hukum", pungkasnya.

Nasir mengkritik ketentuan penutup Perppu yang cenderung menjadi alasan pembenaar dilakukannya tindakan yang berpotensi terjadi korupsi. Dalam pasal 27 ayat 1 misalnya terkait biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi ini, termasuk di dalamnya kebijakan di bidang perpajakan, keuangan daerah, pemulihan ekonomi nasional bukanlah merupakan kerugian negara.

"Ada indikasi kalau Perppu ini dirancang dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi virus corona berasal dari pajak dan keringat rakyat. Ada kesan Perppu itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum", ujar Nasir.

Politisi PKS itu heran kenapa ketentuan seperti itu bisa lolos dalam Perppu. Padahal dalam menjalankan kebijakannya, pejabat pemerintah diharuskan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Bagaimana mungkin, lanjutnya, ada ketentuan hukum yang sekaligus berfungsi sebagai hakim.

"Ketentuan ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 yang jelas menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya institusi yang menilai adanya kerugian negara dan besarannya", ujar Nasir.

Disamping itu, lanjutnya, pasal 59 ayat 1 UU Perbendaharaan Negara juga mengatur



bahwa kerugian negara dapat terjadi karena kelalaian pejabat negara. Adanya pasal "kebal hukum" itu, tentu akan meloloskan pejabat yang terindikasi koruptif saat menerapkan kebijakannya dalam mengatasi pandemi virus corona.

Dikatakan Nasir, ketentuan pada ayat 2 itu juga absurd karena di dalam ayat ini ada kalimat yang berbunyi "tidak dapat dituntut maupun dipidana jika dalam melaksanakan tugas yang didasarkan pada iktikad baik". Kentautan ini aneh tapi nyata.

"Pertanyaannya yang bisa menilai iktikad baik atau bukan itu tentu penegak hukum. Apakah itu sifatnya diskresi atas suatu tindakan yang bisa menyelamatkan bangsa, namun bukan berarti tidak bisa disentuh oleh hukum", pungkas Nasir.

Nasir juga menyinggung UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membatasi diskresi (atau tindakan) tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.

Saat ini juga sudah ada Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dalam hal ini keadaan bahaya seperti bencana alam, ancaman hukumnya itu pidana mati. Perppu ini telah berfungsi seperti tembok besi yang menghalangi penerapan pasal hukuman mati itu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id | Foto : dpr.go.id

## POTONG GAJI BULAN APRIL

# Jazuli Juwaini Belanjakan Sembako Bantu Rakyat terdampak Corona

Fraksi PKS dari pusat hingga daerah bersepakat kembali untuk mengalokasikan gaji bulan April untuk pengadaan paket sembako bagi mereka. Tentu tidak akan menjangkau semua, tapi mudah-mudahan inisiatif ini bisa diikuti banyak orang sehingga menjadi gerakan sosial yang semakin besar. Setidaknya bisa dimulai dengan membantu tetangga memenuhi kebutuhan akibat wabah ini

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

# 2,5 TON BERAS

Dan kebutuhan lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat, diserahkan Jazuli melalui DPD PKS di Kota/Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. pada Selasa (31/03/2020)



# Lagi, Fraksi PKS Potong Gaji Anggota Untuk Rakyat Terdampak Corona

Gerakan jaring pengaman sosial PKS yang dicanangkan berupa pengumpulan dan pendistribusian kebutuhan pokok dan diberikan kepada masyarakat terdampak, khususnya para pekerja informal dan pekerja harian yang terputus penghasilannya karena harus ikut program 'di rumah saja' dan 'menjaga jarak fisik',

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Wabah Covid-19 harus menjadi momentum untuk membangun solidaritas nasional melalui gerakan saling membantu dan gotong royong, sembari menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona.

"Kita juga tidak bisa menunggu gerak pemerintah atau hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, apa yang bisa kita bantu kita bantu, kita bangun solidaritas untuk bahu-membahu menolong rakyat yang terke-

na dampak wabah corona ini sesuai kemampuan dan kewenangan," pesan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4).

Hal itulah yang mendorong PKS dan Fraksi terus melakukan inisiatif menggalang gerakan dan bantuan secara nasional. Setelah sebelumnya menancangkan gerakan bagi-bagi masker dan disinfektan serta pemotongan gaji dewan pusat dan daerah bulan Maret untuk APD pahlawan medis, kini

Fraksi PKS kembali menginisiasi gerakan pemotongan gaji bulan April untuk jaring pengaman sosial PKS melalui bantuan langsung paket sembako

Struktur PKS dari pusat hingga daerah juga membentuk Gerakan Tanggap Bencana (Genta) PKS. "Gerakan jaring pengaman sosial PKS yang dicanangkan berupa pengumpulan dan pendistribusian kebutuhan pokok dan diberikan kepada masyarakat terdampak, khususnya para pekerja informal dan pekerja harian yang terputus penghasilannya karena harus ikut program 'di rumah saja' dan 'menjaga jarak fisik'," terang Jazuli. Inisiatif ini penting karena pemerintah semakin ketat membatasi orang keluar rumah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo, bahkan kemungkinan akan diikuti darurat sipil.

"Ini artinya masyarakat tidak mampu dan rentan seperti pekerja informal dan harian akan semakin kena dampaknya. Oleh karena itu,



Fraksi PKS dari pusat hingga daerah bersepakat kembali untuk mengalokasikan gaji bulan April untuk pengadaan paket sembako bagi mereka," tegas anggota Komisi I DPR RI ini. Anggota DPR Dapil Banten ini sendiri telah menyerahkan 2,5 ton beras dan kebutuhan

lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui DPD PKS di Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon. Kegiatan yang sama secara serentak dilakukan oleh seluruh anggota DPR dan DPRD PKS seluruh Indonesia

Terapkan Darurat Sipil,

# Wakil Ketua Fraksi PKS: Bukti Pemerintah Tak Peduli Rakyat

Harusnya Pemerintah menetapkan status karantina lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan menggunakan Undang-Undang ini maka Pemerintah wajib menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat yang berada di wilayah karantina

## **Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Tangerang (01/04) — Wakil Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyayangkan sikap Pemerintah menerapkan darurat sipil untuk menanggulangi persebaran Covid 19.

Harusnya Pemerintah menetapkan status karantina lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan menggunakan Undang-Undang ini maka Pemerintah wajib menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat yang berada di wilayah karantina.

"PKS menolak penerapan darurat sipil yang ditetapkan Presiden Jokowi, Senin (30/3). Keputusan tersebut tidak tepat dan terkesan mengabaikan kepentingan rakyat.

"Indonesia akan dicatat sebagai negara terburuk dalam

penanganan wabah Covid 19. Negara lain sibuk berlomba memberi pelayanan terbaik kepada rakyatnya, di negara ini rakyat dibiarkan di rumah tanpa jaminan pangan," tegas Mulyanto di sela acara pembagian masker dan hand sanitizer di Kota Tangerang.

Mulyanto menyebut, Amerika saja menyediakan anggaran Rp 35.000 triliun untuk mengatasi dan membantu rakyat selama masa karantina. China menyiapkan Rp 143 triliun, India Rp 314 triliun, Philipina Rp 216 triliun dan Malaysia Rp 916 triliun.

"Ini Indonesia, negara Pancasila yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan secara nyata, bahwa tujuan dari dirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, malah abai terhadap tuntutan rakyat," sindir anggota Komisi VII DPR RI yang membiddangi masalah



Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Lingkungan Hidup.

Untuk itu PKS, menurut Mulyanto, menolak kebijakan darurat sipil yang ditetapkan Pemerintah. Bersama elemen bangsa lainnya, PKS akan

mengupayakan tindakan politik agar keputusan ini dibatalkan.

"Sebab keputusan ini tidak tepat di tengah kondisi darurat jutaan nyawa rakyat," tandas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI:

# Pemerintah Harus Fokus dan Serius Tangani Covid 19

Mengelola negara jangan seperti mengelola LSM. Negara adalah organisasi dengan otoritas tertinggi dengan dukungan aparat dan pendanaan yang resmi. Semua harus dijalankan secara binding and compulsory (mengikat dan memaksa, red). Pendekatan yang dipakai bersifat struktural mandatory, bukan cultural voluntary

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Jakarta (01/04) — Wakil Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, minta Pemerintah fokus tangani peningkatan jumlah pasien dan korban Covid 19.

Menurut Mulyanto, dalam kondisi seperti ini sebaiknya Pemerintah menunda membicarakan hal yang tidak berhubungan langsung dengan upaya penanggulangan Covid 19.

"Ini masalah mendesak. Soal hidup-mati rakyat. Pemerintah harus mencurahkan segenap pikiran dan tindakan untuk menyelamatkan nyawa

rakyat," ujar Mulyanto.

Sekarang ini, lanjut Mulyanto, sebaiknya Pemerintah mengerahkan semua jajaran untuk menyelesaikan masalah Covid 19, apalagi Presiden sudah menetapkan kondisi hari ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Bangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tentukan target kerja bersama sehingga persoalan Covid 19 ini bisa dituntaskan.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai PKS ini

mendesak Pemerintah untuk menunda membicarakan masalah Omnibus Law, rencana pemindahan Ibukota Negara dan lain-lain.

Membahas hal-hal startegis dan kontroversi seperti ini perlu waktu dan pemikiran yang matang dan tenang.

Jika dipaksakan dibahas saat ini dikhawatirkan akan melahirkan keputusan yang prematur dan kontraproduktif.

"Jadi alangkah bijak dalam kondisi darurat seperti ini kita fokus menangani masalah Covid 19. Kita selesaikan dulu masalah besar bangsa ini sebelum membahas hal lain yang bisa ditunda," imbuh anggota Komisi VII DPR-RI ini.

Mulyanto juga mengkritik langkah Pemerintah menggalang donasi untuk penanggulangan Covid 19.

Menurut Mulyanto tindakan tersebut tidak tepat dan bisa mencoreng wibawa Pemerintah di hadapan rakyat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan dengan jelas bahwa salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa



dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Artinya, Pemerintah harus berupaya maksimal mengambil peran menyelamatkan nasib rakyat dengan seluruh kewenangan yang dimiliki.

"Mengelola negara jangan seperti mengelola LSM. Negara adalah organisasi dengan otoritas tertinggi dengan dukungan aparat dan pendanaan yang

resmi. Semua harus dijalankan secara binding and compulsory (mengikat dan memaksa, red). Pendekatan yang dipakai bersifat struktural mandatory, bukan cultural voluntary," tegas Mulyanto.

Terbitnya PP, Kepres dan Perpu terkait Covid-19 ini sudah tepat. Karenanya Pemerintah agar fokus pada implementasinya di lapangan.

# Lawan Covid-19, Toriq Apresiasi Dedikasi para Tenaga Medis

Sebagai wakil rakyat dan atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi yang diberikan pada bangsa ini.

## **KH TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar XI

Tasikmalaya (02/04) – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyampaikan data Dinkes Kota Tasikmalaya per tanggal 1 April 2020 bahwa jumlah pasien positif Covid 19 sebanyak 6 orang dan 1 orang meninggal dunia, ratusan orang bersatus ODP.

"Sedang di Garut menurut Pusat Informasi Positif Covid 19 kabupaten garut, 1 orang dinyatakan positif, ribuan orang bersatus odp", ujar Toriq.

Penyebaran covid 19 di daerah tempat pemilihan Toriq sudah pada kondisi mengkhawatirkan.

"Tapi saya punya keyakinan besar wabah ini akan berhenti jika kita semua disiplin

menjalankan cara pencegahan penyebaran covid 19 ini", pungkasnya.

Toriq menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para seluruh Tenaga Medis baik dari sipil maupun militer yang terus bekerja keras menolong para korban virus corona di seluruh Indonesia.

"Sebagai wakil rakyat dan atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi yang diberikan pada bangsa ini", apresiasi toriq.

Selanjutnya Toriq menjelaskan bahwa Para tenaga medis, adalah orang yang paling beresiko terkena

covid 19. Menurut data yang di rilis oleh Ikatan Dokter Indonesia, sebanyak 11 orang dokter meninggal akibat terpapar covid 19. Puluhan tenaga medis di ibukota terindikasi positif covid 19.

"Saya minta negara harus hadir untuk menyelamatkan mereka dengan memberikan perlengkapan dan peralatan medis yang terbaik. Terbaik secara kuantitas dan kualitas," tegas Toriq.

Selaku anggota komisi I DPR RI Toriq juga memberikan apresiasi kepada para Dokter dan Tim Medis TNI yang ikut terjun dalam menangani pasien covid 19 di RS Darurat Virus Corona, Wisma Altlet, Jakarta.

"Sudah saatnya semua elemen bangsa bahu membahu dalam menghadapi wabah covid 19 ini. Dan semoga Allah SWT segera mengangkat wabah dari tanah air kita. Aamiin", tutup Toriq.

Foto : dpr.go.id



# Bukhori: Pemerintah Jangan Aji Mumpung di Tengah Pandemi

Jika kita lebih cermat dalam melihat pasal 27 ini, kita akan menemukan celah yang besar bagi terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran. Sebab, model bantuan seperti ini sangat berisiko menjadi lahan basah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana pola serupa pernah terjadi dalam kasus skandal dana talangan Bank Century”

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (02/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengingatkan agar pemerintah tidak mencuri kesempatan di tengah situasi krisis. Hal ini disampaikan politisi PKS tersebut menyusul terbitnya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19.

Menurutnya, terdapat beberapa pasal kontroversial dalam Perppu tersebut. Salah satunya adalah Bab V Ketentuan Penutup pasal 27 dari ayat (1) sampai (3). Pada pasal 27 ayat

(1) tersebut berbunyi;

“Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pendapatan negara... merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara,” ujar Bukhori.

Menurut Bukhori, pasal 27 ini membuat pengambil kebijakan menjadi kebal hukum jika dalam pelaksanaan Perppu ini terjadi maladministrasi seperti penyalahgunaan anggaran, pembiayaan yang tidak efektif

dan efisien, penggelapan dana, dan sejenisnya.

“Jika kita lebih cermat dalam melihat pasal 27 ini, kita akan menemukan celah yang besar bagi terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran. Sebab, model bantuan seperti ini sangat berisiko menjadi lahan basah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana pola serupa pernah terjadi dalam kasus skandal dana talangan Bank Century” ujar Bukhori di Jakarta, Kamis (02/04/2020)

Bukhori melanjutkan, sela-

in itu pasal 27 ayat (2), berbunyi: Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pada ayat (3) berbunyi: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan



kan kepada PTUN,” ungkapnya.

Politisi asal Jepara ini menilai, pada ayat selanjutnya di Perppu ini, secara tidak langsung menihilkan fungsi BPK dan DPR untuk melakukan fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Logikanya, jika memang ditemukan masalah keuangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh BPK atau DPR, pembuat kebijakan yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dengan dalih tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik.

“Perlu dipahami bahwa Perppu ini terbit tanpa melibat-

kan partisipasi DPR. Padahal uang yang digelontorkan berasal dari APBN, uang rakyat, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaannya. Kami mengkhawatirkan dengan tidak adanya pengawasan efektif dalam penyaluran dana tersebut, sebagaimana sudah diatur dalam Perppu, berisiko menimbulkan bencana keuangan. Apalagi, jika kemungkinan buruk tersebut benar terjadi, pejabat terkait tidak bisa diseret ke pengadilan. Dimana letak keadilannya?” pungkas Bukhori.

Foto : dpr.go.id

## Apresiasi Perppu Covid-19

# HNW Ingatkan Pemerintah Serius dan Jauhi Korupsi

“Investasi di pembangunan manusia melalui dana pendidikan harus terus dilakukan, agar kelak tercipta semakin banyak dokter atau ilmuwan asal Indonesia untuk menanggapi wabah virus semacam korona ini di kemudian hari

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (03/04) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyambut positif langkah pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai respon untuk mengatasi wabah Covid-19, tetapi sekaligus mengingatkan pemerintah berhati-hati mengalokasikan dan merelokasi anggaran agar tepat sasaran serta menjauhi tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

“Perppu ini perlu kita apresiasi, karena ditujukan untuk atasi covid 19, dan tidak untuk menetapkan status

darurat sipil, wacana yang dikritik masyarakat luas. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar anggaran untuk wabah Covid 19 bisa tepat sasaran dan tak melampaui ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (02/04).

Hidayat yang akrab disapa HNW menyoroti sumber anggaran penanganan wabah Covid-19 yang berasal dari sisa anggaran, dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai oleh negara (uang sitaan), dana Badan Layanan Umum (BLU) dan dana Badan Umum Milik

Negara (BUMN) sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e Perppu tersebut.

Ia menilai seharusnya pemerintah merealokasikan juga anggaran yang tak sangat urgent spt anggaran untuk membangun ibukota yg baru, dan anggaran infrastruktur yang dalam APBN 2020 nilainya mencapai Rp 419 Triliun.

“Seharusnya bukan Dana Abadi Pendidikan yang diambil dan dikorbankan, melainkan dana pembangunan ibukota baru, dan infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. Apalagi untuk Dana Abadi Pendidikan ternyata ada Perpres 12/2019 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yg tidak dapat digunakan untuk belanja,” ujarnya.

HNW menuturkan bahwa Dana Abadi Pendidikan sangat bermanfaat untuk pembangunan manusia Indonesia sekaligus revolusi mental yang sering



dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Investasi di pembangunan manusia melalui dana pendidikan harus terus dilakukan, agar kelak tercipta semakin banyak dokter atau ilmuwan asal Indonesia untuk menangani wabah virus semacam korona ini di kemudian hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan ada pula dana realokasi dari anggaran Kementerian yang tidak urgen sebagaimana disebutkan oleh Presiden Jokowi senilai Rp 62 Triliun.

“Dengan realokasi anggaran tersebut ditambah dengan realokasi dana infrastruktur, itu sudah bersesuaian dengan anggaran

untuk atasi wabah Virus Covid-19 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 405 Triliun,” ujarnya.

Selain itu, HNW juga mengkritik ketentuan Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai bidang merupakan penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ia menilai bahwa pemerintah seperti ingin berlindung dari Pasal itu agar tidak bisa terjerat kasus korupsi, sekalipun kemungkinan terjadinya korupsi bisa terbuka, karena salah satu unsur dalam korupsi adalah adanya kerugian negara.

Selengkapnya di [Fraksi.pks.id](http://Fraksi.pks.id)

Wakil Ketua Fraksi PKS:

# Program Bantuan Pengaman Sosial Harus Segera Direalisasikan

percepatan program bantuan atau jaring pengaman sosial (social safety net) sangat mendesak, karena dampak ekonomi dari wabah ini sudah sangat signifikan

## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (31/03) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam merisaukan dampak ekonomi yang mulai terasa berat dari pandemi korona baru (Covid-19) terutama untuk pekerja informal, buruh dan usaha harian.

“Satu bulan terakhir dampaknya semakin terasa berat untuk rakyat kecil, terutama saudara-saudara kita pekerja informal dan usaha harian. Keluhannya kondisi ekonomi mereka yang berat sebagai dampak banyak berhentinya aktivitas bisnis, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Pemerintah perlu

bergerak cepat untuk mengeksekusi kebijakan bantuan pengaman sosial agar tidak terjadi ledakan masalah sosial dari problem ekonomi ini”, tegasnya menanggapi perkembangan yang ada.

Menurutnya percepatan program bantuan atau jaring pengaman sosial (social safety net) sangat mendesak, karena dampak ekonomi dari wabah ini sudah sangat signifikan.

“Banyak kelompok masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan. Kita perlu segera memastikan kelompok menengah bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah bisa meningkatkan dan memperluas program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam kondisi ketika pembatasan sosial skala besar dijalankan, program BLT seperti ini akan lebih efektif dibanding PKH. Perluas cakupan rumah tangga sasaran, berikan bukan hanya untuk yang miskin, tetapi juga hampir miskin yang terdampak. Data cepat dan jangan ada yang ketinggalan”, imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menekankan perlunya dukungan anggaran untuk peningkatan secara drastis sarana dan prasarana kesehatan sehingga siap menghadapi risiko lonjakan kasus, mulai dari rumah sakit hingga perlengkapan medis.

“Termasuk pemberian reward dan bonus kepada tenaga medis dan pihak lain yang terbukti bekerja keras menangani pandemi ini. Kita



juga dukung jaminan pendapatan bagi para korban agar mereka fokus pada pemulihan. Sehingga tidak perlu terjadi pasien harus melarikan diri takut dikarantina karena kehilangan pendapatan”, tambahnya.

Ecky juga menekankan perlunya review dan realokasi dua paket stimulus awal yang sudah dikeluarkan pemerintah. Paket stimulus ekonomi pertama bernilai Rp 10,3 triliun dan yang kedua bernilai Rp 22,9 triliun.

Langkah pemerintah mengeluarkan dua paket stimulus awal perlu dipertajam dan perlu lebih fokus pada

mitigasi risiko. Paket stimulus pertama perlu direalokasi agar lebih fokus pada sektor kesehatan. Dalam paket stimulus pertama, pemerintah memberikan potongan harga untuk penerbangan, hotel dan sebagainya. Tujuannya agar aktivitas pariwisata bisa berjalan. Ini jelas sudah tidak efektif saat ini karena justru masyarakat sudah menghindari bepergian,” tegas Ecky.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id  
Foto : dpr.go.id

# Anggota Fraksi PKS Tegaskan Perppu 1/2020 Jangan Sampai Jadi “Aji Mumpung”

“Jangan bilang tidak mungkin, karena di negeri ini oknum-oknum pejabat bermental korup selalu bermunculan. Sikap mental áji mumpung dari oknum-oknum tertentu akan memanfaatkan Perpu yang memberi ‘cek kosong’ kepada pemerintah ini

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (05/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Fahmy Alaydroes, menyoroti rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang akan diundangkan menjadi Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perppu yang telah diserahkan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada DPR, dimaksudkan untuk menghadapi krisis Covid-19.

Bila dicermati lebih lanjut, Menurut Fahmy, Perpu ini lebih banyak mengutar penanggulangan ancaman krisis ekonomi, dibandingkan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 itu sendiri.

“Bahkan terkesan, Perpu ini memberikan banyak kekelewasan kepada Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11,” terang Anggota Badan Anggaran DPR ini.

Keluasaan dan kewenangan tersebut, lanjut Fahmy, semakin kuat karena semua tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah

tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata (Pasal 27 ayat 1 dan 2), dan semua kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat digugat di PTUN, karena bukan obyek hukum (pasal 27 ayat 3).

Tentu saja, kata Fahmy, Perpu ini boleh jadi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bermental korup dan serakah, melakukan tindakan moral hazard untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

“Sepaimana yang diungkapkan Presiden PKS, M. Sohibul Iman dalam surat terbuka beliau kepada Presiden Jokowi (03/04/2020), Perpu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money),” ungkap pria berkecamata ini.

“Jangan bilang tidak mungkin, karena di negeri ini oknum-oknum pejabat bermental korup selalu bermunculan. Sikap mental áji mumpung dari



oknum-oknum tertentu akan memanfaatkan Perpu yang memberi ‘cek kosong’ kepada pemerintah ini,” imbuhnya.

Sesungguhnya, Fahmy menambahkan, dalam hal menghadapi krisis keuangan ataupun ekonomi dalam situasi dan kondisi tertentu, kita sudah memiliki UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.

“Dalam UU tersebut sudah sangat rinci dan memberikan kewenangan yang cukup bagi pemerintah, untuk melakukan berbagai langkah yang diperlu-

kan untuk menanggulangi dampak krisis,” tegas Politisi PKS ini.

Bahkan, Fahmy menegaskan, UU tersebut jauh lebih demokratis karena mewajibkan Pemerintah untuk transparan ataupun ekonomi dalam situasi dan kondisi tertentu, kita sudah memiliki UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.

“Lalu, untuk apa UU ini dibuat bila tidak digunakan? Ada apa sesungguhnya dibalik terbitnya Perpu ini..?,” tanya Fahmy Alaydroes mengakhiri.



# Mardani Kritik Kesalahan Logika Pemerintah: Indonesia Darurat Kesehatan

Pemerintah tidak perlu enggan menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menerapkan langkah Karantina Rumah, Wilayah, dan Rumah Sakit serta menanggung kebutuhan hidup dasar rakyat. Pemerintah tidak perlu enggan menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menerapkan langkah Karantina Rumah, Wilayah, dan Rumah Sakit serta menanggung kebutuhan hidup dasar rakyat.

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (31/03) — Inisiator gerakan #KamiOposisi, Mardani Ali Sera mengkritik kesalahan logika Presiden Joko Widodo yang menerapkan kebijakan darurat sipil ketimbang lockdown parsial atau karantina wilayah. Mardani mengatakan Indonesia itu darurat kesehatan nasional.

“Kebijakan penerapan

darurat sipil adalah logical fallacy fatal Pemerintah. Kita itu sedang dalam keadaan darurat kesehatan nasional dan global bahkan. Kebijakan menunjukkan ketidak pekaan dan keperikemanusiaan pemerintah,” kata Mardani, Jakarta, (31/03).

Lebih lanjut, legislator

Fraksi PKS ini sedari awal pemerintah sudah abai dan menganggap enteng pandemik global ini.

“Sekarang malah lebih buruk lagi pilihan kebijakannya, ada pilihan lebih rasional dan humanis mumpung belum yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” ujar Mardani.

Mardani yang terpilih mewakili Dapil Jakarta Timur itu heran dengan ke-engganan pemerintah.

“Jujur saja, saya betul-betul tidak habis pikir apa yang dipikirkan Pemerintah memilih darurat sipil ketimbang karantina wilayah? Apa harga nyawa itu lebih murah dari pada nyawa 1 orang manusia?,” tanya Mardani.

Mardani minta segera mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih humanis, karena kita sedang berlomba dengan virus masalah waktu.

“Mumpung belum telat, atas nama rakyat saya mendesak Presiden merivisi kebijakan dengan lebih memilih



kebijakan humanis!” ujarnya.

Ia berpendapat Karantina wilayah lebih baik namun tidak cukup hanya dengan pembatasan sosial bersekala besar.

“Perlu juga dilakukan karantina rumah, karantina wilayah dan karantina rumah sakit untuk zona merah,” kata Mardani.

Ia menghimbau agar Pemerintah tidak perlu enggan menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menerapkan

langkah Karantina Rumah, Wilayah, dan Rumah Sakit serta menanggung kebutuhan hidup dasar rakyat.

“Ini aman konstitusi, pemerintah bisa bekerjasama dengan pengusaha, pemerintah daerah gotong royong menanggung hidup orang yang paling besar terkena imbas pandemik ini. Insya Allah bisa, Indonesia Bisa bangkit,” pungkasnya



**PKS**

# SURAT TERBUKA

Presiden PKS M. Sohibil Iman  
Untuk Presiden RI Joko Widodo

# Surat Terbuka Presiden PKS M. Sohibil Iman Untuk Presiden RI Joko Widodo



Yth Bapak Presiden RI  
Joko Widodo  
Di tempat

Pertama-tama, kami berdoa semoga Bapak dan keluarga sehat wal afiat serta diberi petunjuk dan perlindungan oleh Allah Swt memimpin Bangsa Indonesia dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini.

Sebelumnya kami juga

ingin menghaturkan sekali lagi rasa bela sungkawa atas wafatnya Ibunda Bapak Presiden. Semoga amal baik almarhumah diterima di sisi Allah Swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Bapak Presiden RI Joko Widodo yang Terhormat, izinkan kami menyampaikan pandangan kami terkait kebijakan penanganan bencana

Pandemic Covid-19. Semoga pandangan ini menjadi masukan yang memiliki nilai kebermanfaatn bagi penyelesaian krisis ini.

Pertama, bangsa ini harus memiliki kesamaan pandangan bahwa keselamatan warga adalah hal yang utama dan pertama di atas segalanya termasuk di atas kepentingan ekonomi.

Para ahli juga sepakat bahwa kondisi ekonomi nasional dan global adalah fungsi dari kecakapan atau kemampuan kita dalam menangani krisis Pandemic Covid-19 ini. Jika kita semakin cepat dan tepat meresponnya, maka semakin cepat ekonomi akan pulih. Dan sebaliknya, jika kita semakin lambat dan tidak akurat dalam mengananya maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya.

Jika kita bedah akar masalah dari ekonomi saat ini adalah krisis pandemic Covid-19. Sedangkan ancaman krisis ekonomi hanyalah akibatnya.

Jika kita ibaratkan, ancaman krisis ekonomi sebagai asap kabut yang menutupi pandangan kita maka solusinya bukan menghilangkan asap kabutnya tetapi memadamkan apinya terlebih dahulu. Kita cari sumber kebakarannya dimana. Padamkan dan cegah penyebaran titik kebakarannya. Karena akan percuma saja jika kita hilangkan asap kabutnya jika sumber apinya tetap membakar dan menyebar kemana-mana.

Kedua, bangsa ini harus memiliki pandangan yang sama bahwa ekonomi nasional dan global cepat atau lambat akan pulih kembali (rebound), sedangkan korban warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi.

Setiap warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukanlah angka statistik saja. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki keluarga yang sangat mencintai mereka. Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita dan sahabat kita.

Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis (cost of crisis). Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi (cost of economic recovery). Pemulihan ekonomi memang penting tetapi jauh lebih penting adalah keselamatan nyawa warga kita Pak!

Ketiga, kami bisa memahami posisi sulit Bapak Presiden.

---

Jika kita bedah akar masalah dari ekonomi saat ini adalah krisis pandemic Covid-19. Sedangkan ancaman krisis ekonomi hanyalah akibatnya. Jika kita ibaratkan, ancaman krisis ekonomi sebagai asap kabut yang menutupi pandangan kita maka solusinya bukan menghilangkan asap kabutnya tetapi memadamkan apinya terlebih dahulu

---

# Lanjutan Surat terbuka (1)

Saat ini, hal yang paling utama dilakukan pemerintah adalah mendukung 100 persen kebutuhan para tenaga medis seperti penyediaan APD, Penyediaan Swab Test yang mencukupi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Tidak mudah memimpin dalam situasi krisis seperti saat ini. Dalam situasi krisis, hal yang sangat penting untuk Bapak lakukan adalah mendengarkan nasihat kebijakan dari orang atau pihak yang paling tepat. Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi, para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkannya nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa warga.

Di pundak merekalah harapan kita bentangkan. Dengarkan suara dan aspirasi mereka. Jadikan mereka VIP di lingkaran Bapak.

Mereka lah yang memiliki kredibilitas, integritas dan pandangan secara jernih dan tidak memiliki konflik kepentingan. Sekali lagi, merekalah yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik dan bisnis! Dengarkan pandangan tulus mereka Pak!

Jangan dengarkan orang-orang di sekitar Bapak yang hanya mau menjilat Bapak dan bersikap Asal Bapak Senang! Jangan dengarkan pandangan dan bisikan para pembantu Bapak yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik.

Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar dimana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata!

Jangan salah pilih penasehat di lingkungan Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!

Keempat, kami meminta Bapak Presiden agar tidak mempertimbangkan lagi opsi penerapan Darurat Sipil. Jangan pernah memilih Darurat Sipil Pak. Jangan bunuh demokrasi dan HAM di Republik ini Pak! Bukankah sudah ada UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU terkait lainnya seperti UU Penanggulangan Bencana? Kami memandang itu semua sudah mencukupi sebagai acuan dalam penanganan krisis Pandemic Covid-19.

Saat ini, hal yang paling utama dilakukan pemerintah adalah mendukung 100 persen kebutuhan para tenaga medis seperti penyediaan APD, Penyediaan Swab Test yang mencukupi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Swab Test harus dilakukan secara cepat dan masif. Dan ini harus menjadi prioritas utama Pemerintah memberikan dukungan agar kita bisa memitigasi penyebaran Covid-19.

Pemerintah juga harus tegas dan berani tetapkan Karantina Wilayah untuk

daerah-daerah yang sudah zona merah seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Tanpa ada kebijakan Karantina Wilayah akan sulit memitigasi penyebaran Covid-19. Tanpa ada Karantina Wilayah, terutama untuk daerah Zona Merah, sulit untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lain.

Kebijakan pelarangan Mudik Lebaran harus diterapkan dengan tegas. Kabinet harus satu suara terkait ini. Jangan sampai terjadi outbreak kedua kalinya. Jangan sampai episentrum Covid-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari Pusat berpotensi menjadi agen yang

menyebarkan Covid-19 di kampung halamannya. Ini yang sangat berbahaya.

Kelima, kami mengapresiasi terhadap kebijakan Pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun yang perlu juga mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM kita yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa. Ini harus mendapat keberpihakan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka.

Keenam, kami ingin memberikan catatan penting



# Lanjutan Surat terbuka (2)

terkait Perppu No.1 tahun 2020 yang Bapak tandatangani.

(1) Perppu ini lebih banyak mengatur penanggulangan ancaman krisis ekonomi dibandingkan pencegahan dan penanganan Pandemic Covid-19 itu sendiri. Seharusnya, pemerintah memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis Pandemic Covid-19. Fokus kepada penyebab utama (Covid-19) bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi).

Terkait mekanisme penyelesaian krisis seharusnya pemerintah cukup menggunakan mekanisme yang sudah di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo terkait UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Dengan mekanisme baru dalam Perppu No. 1 tahun 2020 ini potensi terjadinya Skandal BLBI seperti kasus krisis 1998 berpeluang akan terulang lagi. Moral Hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi.

(2) Perppu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunaan

penggunaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money).

Kami khawatir Bapak Presiden tidak menyadari hal ini. Kami khawatir para pembantu di lingkaran Bapak tidak memberikan informasi yang benar dan tepat sehingga Bapak menandatangani Perppu yang sangat membahayakan bagi kepemimpinan Bapak dan masa depan bangsa ini.

Jangan sampai sejarah mencatat sejarah kelam kepemimpinan Bapak dengan Perppu ini. Bapak Presiden sudah tidak memiliki kepentingan politik di pemilu mendatang. Untuk saat ini, sikap negarawan Bapak akan sangat dirindukan. Berikanlah warisan sejarah yang membanggakan bagi generasi setelah Bapak.

(3) Perppu No. 1 tahun 2020 banyak menganulir beberapa ketentuan di UU lain (Omnibus Law) seperti UU Keuangan Negara, UU MDS, UU Perbendaraan Negara, UU Perpajakan, UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, UU Pemerintah Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU APBN 2020 dan UU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis. Ada upaya sentralisasi kekuasaan kepada kewenangan eksekutif

yang sangat besar dan hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan yang besar. Bapak Presiden harus ekstra hati-hati dengan Perppu ini.

(4) Perppu ini juga tidak lagi berpegang pada prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dimana defisit fiskal menjadi tidak terbatas, sehingga utang negara akan melonjak drastis tak terkontrol, hilangnya independensi Bank Sentral dalam menjaga stabilitas moneter, kewenangan pengawasan dan hak budget DPR RI yang semakin dibatasi, dan pemberian imunitas serta diskresi tanpa batas bagi KSSK dalam membuat kebijakan sehingga mereka tidak tersentuh oleh mekanisme penegakan hukum. Ini semua akan menjadi resep yang sempurna bagi bencana ekonomi, politik dan hukum kita dimasa depan.

(5) Perppu ini dalam salah satu ketentuannya mengatur tidak hanya terbatas pada penanganan krisis Pandemic Covid-19. Tetapi juga mengatur terhadap semua ancaman lain yang dianggap oleh pemerintah membahayakan ekonomi nasional. Diskresi tanpa limitasi ini sangat berbahaya. Harus ada limitasi isu dan

---

Jangan sampai sejarah mencatat sejarah kelam kepemimpinan Bapak dengan Perppu ini. Bapak Presiden sudah tidak memiliki kepentingan politik di pemilu mendatang. Untuk saat ini, sikap negarawan Bapak akan sangat dirindukan. Berikanlah warisan sejarah yang membanggakan bagi generasi setelah Bapak

---

limitasi waktu.

Jika tidak dilakukan pembatasan wewenang, isu dan waktu maka akan sangat membahayakan bagi sistem keuangan dan sistem pemerintahan Indonesia. Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju era otoritarianisme. Perppu ini akan menyuntik mati demokrasi kita.

Demikian catatan singkat kami. Semoga menjadi catatan yang bermanfaat dalam pembahasan nanti antara Pemerintah dan DPR RI.

Tentu saja sikap politik PKS akan disampaikan secara lengkap dan resmi oleh Fraksi PKS di DPR RI.

Kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera sebelum Pemerintah meminta pun kami sudah berjuang bersama elemen masyarakat lainnya membantu penyelesaian

krisis Pandemic Covid-19 ini.

Kami telah instruksikan kepada seluruh anggota keluarga besar PKS di seluruh penjuru nusantara untuk berperan aktif membantu meringankan beban masyarakat dan membantu pencegahan penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Krisis itu seperti vaksin: awalnya ia menyakitkan, tetapi jika kita bisa mengelolanya, maka ia justru akan menguntungkan!

Semoga Allah Swt melindungi bangsa Indonesia dan mampu bangkit dari situasi ancaman krisis ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Terimakasih

Salam,  
Mohamad Sohbul Iman  
Presiden PKS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# *Terima Kasih* **Petugas Medis**

*Yang berjuang di garis depan  
melawan virus corona. Semoga Allah  
memberi perlindungan dan Kesehatan*



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Sukamta: Komisi I Dorong Pemerintah Gratiskan Internet Selama Wabah Covid-19

Orang-orang diminta kerja di rumah, anak-anak sekolah dan mahasiswa belajar di rumah, pekerja-pekerja online makin sibuk. Pasti terjadi peningkatan penggunaan internet. Sudah semestinya pemerintah meringankan beban mereka dengan memfasilitasi internet gratis kepada warga, bukan badan usaha, selama wabah Covid-19

## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (02/04) — Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan wabah Covid-19. Diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), listrik gratis untuk daya 450 watt, hingga keringanan kredit tertentu. Namun hal ini belum menyentuh penggunaan internet.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Kamis (2/4) melalui telepon seluler menegaskan kebijakan PSBB belum menyen-

gkan soal penggunaan internet.

"Orang-orang diminta kerja di rumah, anak-anak sekolah dan mahasiswa belajar di rumah, pekerja-pekerja online makin sibuk. Pasti terjadi peningkatan penggunaan internet. Sudah semestinya pemerintah meringankan beban mereka dengan memfasilitasi internet gratis kepada warga, bukan badan usaha, selama wabah Covid-19. Terkhusus, pemerintah juga perlu membebaskan

pulsa telepon bagi para driver ojek daring / ojol, karena ketika semua warga diminta stay at home, merekalah yang berisiko menjadi pengantar mobilitas barang-barang pesanan warga," tegas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa beberapa operator seluler telah mengeluarkan program khusus akibat Covid-19 ini.

"Telkomsel dan Indosat menggratiskan layanan internet untuk akses-akses tertentu, misalnya untuk situs-situs pendidikan. Inisiatif operator ini perlu kita apresiasi. Namun lebih bagus kiranya jika pemerintah mendorong agar internet gratis bisa diterapkan secara masif. Skema kerjasama pemerintah dengan operator seluler perlu dibicarakan secara cermat untuk hal ini," imbuhnya.

Selanjutnya, menurut Sukamta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo juga harus menjamin agar kecepatan internet di Indonesia tidak terdampak signifikan.



"Meskipun laporan Kaspr Datahaus menunjukkan efek wabah Covid-19 terhadap infrastruktur internet yang disebut internet pressure. Tekanan internet ini menyebabkan kecepatan internet melambat. Laporan Ookla perusahaan penguji kecepatan internet, menyebutkan terjadinya pelambatan kecepatan internet di Malaysia dan India hingga di bawah 80 Mbps," pungkasnya.

Di Indonesia, lanjut Sukamta, juga kemungkinan besar bisa berpotensi melambat, makanya pemerintah perluantisipasi sejak dini, misalnya dengan menambah kuota supaya traffic internet masih

bisa tertangani.

"Hal ini perlu perhatian pemerintah. Karena jangan sampai masyarakat sudah mau mematuhi pemerintah untuk stay at home, tapi kebobolan di anggaran penggunaan pulsa internet. Jangan sampai juga internet jadi lemot. Ingat, menurut data We Are Social hingga Januari 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175.4 juta orang. Jika pemerintah menjamin internet gratis dan kecepatannya terjaga, sedikit banyak dapat menarik orang untuk mau patuh stay at home dan tujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dicapai," harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

*Klarifikasi Nasir Djamil:*

# ***Saya Tidak Pernah Usulkan Pembebasan Napi Koruptor***

Menteri menjawab bahwa ini salah satu upaya untuk mencegah virus covid 19 di lapas dan rutan yang jumlahnya diperkirakan maksimal 35 ribu orang. lalu saya bilang kalau alasannya virus corona, apakah yang diluar 35 ribu yang dibebaskan itu yang kini masih mendekam di lapas tidak berpotensi dipapar oleh corona? termasuk juga napi tipikor, terorisme dan narkoba

**H. Muhammmad Nasir Djamil, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI



# Klarifikasi Nasir Djamil: Saya Tidak Pernah Usulkan Pembebasan Napi Koruptor

Apakah yang diluar 35 ribu yang dibebaskan itu yang kini masih mendekam di lapas tidak berpotensi dipapar oleh corona? termasuk juga napi tipikor, terorisme dan narkoba

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si.**

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (5/4) Anggota DPR RI Nasir Djamil memberikan klarifikasi dan menyangkan berkembangnya berita bahwa dirinya menghendaki napi koruptor dibebaskan saat rapat virtual Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 April 2020.

Dalam rapat virtual dengan Menkumham Yasona Laoly, Nasir Djamil dari Fraksi PKS mempertanyakan alasan mendasar diterbitkannya Permenkumham No 10/2020 soal pemberian hak-hak narapidana.

"Menteri menjawab bahwa ini salah satu upaya untuk mencegah virus covid 19 di

lapas dan rutan yang jumlahnya diperkirakan maksimal 35 ribu orang. lalu saya bilang kalau alasannya virus corona, apakah yang diluar 35 ribu yang dibebaskan itu yang kini masih mendekam di lapas tidak berpotensi dipapar oleh corona? termasuk juga napi tipikor, terorisme dan narkoba" ujar Nasir Djamil dalam keterangan Pers yang disampaikan kepada media pada hari Ahad, (5/4) di Jakarta.

Nasir Djamil menjelaskan itu yang disebut diskriminatif, jadi tidak ada secara implisit dan eksplisit fraksi PKS meminta menkumham untuk

mengeluarkan napi Tipikor. Justru dirinya mempertanyakan mengapa Menkumham sendiri yang mengatakan akan merevisi PP 99 tahun 2012 , yang nantinya napi tipikor usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa hukuman akan dibebaskan.

"Dalam rapat itu juga saya meminta kepada Menkumham untuk mengawal pemberian hak itu sehingga tidak ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempatan. Intinya harus clear and clean" pungkas Nasir.

Foto : dpr.go.id



## Jokowi Tidak Gusar Tangani Covid-19

# Dimiyati: Kami Siap Membantu

Harusnya Presiden jangan gusar kami siap membantu melawan musuh bangsa dan negara tercinta ini, semoga musibah dan penyakit masyarakat cepat berlalu selesai dan tuntas dengan langkah-langkah terencana, terstruktur sistematis dan masif

**Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, S.H.,M.H**

Anggota Komisi IV DPR RI

Pandeglang (07/04) — Politisi senior Partrai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Achmad Dimiyati Natakusumah mengkritisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena terlalu banyak mengeluarkan dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19) yang sudah melanda hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Namun, aturan dari pusat sampai ke daerah tersebut, jelas anggota Komisi III DPR RI ini, hampir semuanya hanya bersifat imbauan saja. Tidak jelas sanksi dan hukumannya.

"Ini memperlihatkan labil dan bingungnya Jokowi beserta para pembantunya dalam

Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam menghadapi serbuan wabah yang telah merenggut ratusan nyawa serta ribuan masyarakat Indonesia," kata Dimiyati.

Keterangan tertulis kepada Indonesiaikoran.com, Senin (6/4) malam. Bupati Pandeglang dua periode ini melihat, dalam menangani wabah mematikan itu, Pemerintah tampak serba salah dalam mengambil keputusan sehingga tidak jelas kapan Covid-19 berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa rakyat Indonesia.

Anggota DPR RI tiga periode ini malah mempertanyakan, rencana strategis apa

yang akan dilakukan Jokowi secara masif dan cepat perang melawan Covid-19. Dan, apa impact (dampaknya) terhadap masa depan anak-anak, masa depan untuk ilmu pengetahuan, Sumber Daya Manusia (SDM), perekonomian bangsa.

Saat ini, lanjut peraih gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) tersebut, dunia usaha kesulitan, kantor tutup, pabrik tutup, perbankan siaga satu sehingga mengakibatkan kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok masyarakat sulit didapat, banyak pengangguran yang akhirnya bakal banyak masyarakat depresi yang ujungnya stress, sakit dan meninggal dunia karena situasi, kondisi keamanan, kecukupan sandang pangan dan papan yang sangat memprihatinkan.

Disinilah perlunya, ungkap Dimiyati, keputusan presiden sebagai kepala negara yang berani, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. Selain itu, schedule nya harus jelas sehingga ada waktu finish/goals nya, apa yang akan, sedang dan sudah dikerjakan.



Demikian pula dengan peraturan. Jangan semua institusi mengeluarkan aturan dan mengatur, sehingga sangat membahayakan masyarakat serta para pemangku kepentingan termasuk aparatur dibawahnya.

Sebaliknya terkait hal itu, kata wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Banten ini, agar peraturannya cukup Peraturan Presiden saja, yang penting lengkap dan mudah dibaca dan dilaksanakan aparatur di bawah dan masyarakat Indonesia. Di dalam peraturan itu juga harus jelas sanksinya sehingga tugas penegak hukum ada payung dan panduannya. Untuk masyarakat juga harus ada solusinya serta kompensasinya untuk bangsa dan negara.

Laki-laki kelahiran Tangerang, 17 September 1966 itu

juga mengatakan, institusi kementerian, lembaga negara dan gugus tugas yang dibentuk sebaiknya pengaturannya bersifat ke dalam, jangan membahayakan seperti sekarang.

Dalam Perpres yang dibuat, semua institusi pemerintah terlibat didalamnya. Para stakeholder dan masyarakat ikut bela negara, perang melawan musuh bersama quite dangerous/ the silent enemy (covid19).

"Harusnya Presiden jangan gusar kami siap membantu melawan musuh bangsa dan negara tercinta ini, semoga musibah dan penyakit masyarakat cepat berlalu selesai dan tuntas dengan langkah-langkah terencana, terstruktur sistematis dan masif, aamiin," demikian Achmad Dimiyati Natakusumah

## Soroti Rencana Impor Tak Prosedural

# Anggota Fraksi PKS: Utamakan Produksi Petani

Lebih baik pemerintah fokus untuk mendukung penanganan covid19 yang langsung menyentuh masyarakat. Ekstrimnya, rakyat tidak akan mati karena kelangkaan bawang putih. Tolong Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih berempati kepada rakyat

### **dhr. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (31/03) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet menyoroti rencana pemerintah untuk mengimpor bawang putih dalam waktu dekat ini.

Slamet menilai, ada tahapan prosedural yang tak dilakukan pemerintah dalam melakukan impor tersebut.

"Secara peraturan, ini sudah melanggar setidaknya dua Undang-Undang. Pertama, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam hal ini, pemerintah harus mengutamakan produksi dalam negeri. Sebab, fakta di lapangan yang saya dapatkan, di

Temanggung Jawa Tengah, terdapat sekitar 2880 ton bawang putih milik petani yang belum terjual," jelas Slamet, Senin (30/03/2020).

Kedua, sambung Slamet, terkait UU Hortikultura, dimana di sana diamankan, produk hortikultura yang diimpor harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, hal itu berkaitan dengan banyak hal, seperti keamanan pangan pangan, standar mutu, stok, dan hal-hal lain yang sudah diatur di dalam UU tersebut.

"Setahu saya, bawang putih itu tidak termasuk dalam barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting)," tambah Slamet.

Berdasarkan dua hal di

atas, kata Slamet, pemerintah jangan memamfaat kesempatan yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Berdalih pandemi covid-19, sehingga barang langka, lalu mempermudah para pengusaha untuk melakukan impor bawang putih tanpa melalui prosedur.

"Lebih baik pemerintah fokus untuk mendukung penanganan covid19 yang langsung menyentuh masyarakat.

Ekstrimnya, rakyat tidak akan mati karena kelangkaan bawang putih. Tolong Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih berempati kepada rakyat," tegas Slamet

Terakhir Slamet mengungkapkan, kalau pun harus terpaksa impor, maka wajib lakukan aktivitas impor tersebut sesuai prosedur di dalam UU yang berlaku, agar produk yang masuk aman untuk rakyat, apalagi situasi dunia hari ini seperti ini.

"Sebelum terpaksa haesus impor, serap dulu itu hasil panen petani kita, baru kekurangannya impor," pungkas Slamet.



# Soal Stimulus saat Wabah Korona, Hamid: Perlu Keseriusan & Pengawasan

Saya setuju bila ini hanya berlaku pada daerah-daerah yang berstatus merah, terutama daerah episentrum Jabodetabek. Untuk wilayah-wilayah yang dianggap aman (bebas wabah Covid-19), pemerintah tidak perlu terlalu ketat dan hanya bersifat imbauan saja. Ini seiring dengan penerapan karantina wilayah

## **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (01/04) — Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan sejumlah kebijakan terkait penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Diantaranya mulai pelarangan mudik Lebaran hingga program bantuan maupun keringanan.

Seperti diketahui, saat ini Jokowi tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) dan instruksi presiden (inpres) terkait ketentuan mudik Idul Fitri 2020.

Anggota Komisi IV DPR RI

Hamid Noor Yasin mengatakan, perpres atau inpres ini memiliki durasi singkat, hanya 1 tahun. Yakni sebagai dasar hukum pengaturan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H untuk mencegah persebaran Covid-19. Oleh karena itu, dasar hukum ini mesti detail terkait dengan durasi dan jangkauan wilayah.

"Saya setuju bila ini hanya berlaku pada daerah-daerah yang berstatus merah, terutama daerah episentrum Jabodetabek. Untuk wilayah-wilayah yang

dianggap aman (bebas wabah Covid-19), pemerintah tidak perlu terlalu ketat dan hanya bersifat imbauan saja. Ini seiring dengan penerapan karantina wilayah," tutur Hamid, Rabu (01/04).

Kemudian, penerapan inpres dan perpres juga harus melihat situasi. Jika ternyata dalam waktu yang singkat, wabah Covid-19 ini mampu di atasi, pemerintah mesti menyiapkan skenario pencabutan perpres atau inpres ini.

Sementara itu, Jokowi juga menelurkan kebijakan soal penggratisan pembayaran listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA. Serta diskon 50 persen untuk 900 VA mendapat diskon 50 persen.

Menurut Politisi PKS ini, kebijakan itu sudah sangat tepat. Namun, ada beberapa yang menjadi catatannya. Semestinya ada kompensasi berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 1.300 VA juga. Karena ada tren penurunan harga minyak mentah dunia



hingga 55 persen, jelas menekankan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

"Tapi saya juga mengusulkan, penderitaan rakyat akibat wabah ini tidak cukup dengan hanya pada tarif listrik. Kita mengetahui bersama bahwa harga minyak mentah dunia terus turun tajam," ucap Hamid yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Perlu ada kebijakan yang merakyat yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga bahan bakar minyak (BBM) mesti disesuaikan. Bahkan selain listrik dan BBM, bantuan langsung

mesti segera diupayakan.

Hamid menyarankan bantuan bukan dalam bentuk uang tunai. Karena uang tunai sangat rentan terhadap konversi peruntukan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah makanan yang tersedia dengan aman di rumah-rumahnya. Pemerintah dapat memberi bantuan langsung sembako (BLS), di mana logistik ini akan aman dari konversi peruntukan.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id) | Foto : [dpr.go.id](http://dpr.go.id)

# Johan Rosihan: Akibat Corona, Kurangi Dampak Ekonomi bagi Petani & Nelayan

"Sebagai salah satu fokus penanganan dampak Covid-19 ini, padahal aspek pangan merupakan komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi situasi pandemic global penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)"

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (31/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, saat mengikuti rapat internal online Komisi IV Selasa, (31/3), mengatakan situasi wabah Covid-19 di Indonesia saat ini berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi kelima di dunia.

Menurut Johan, disamping penanganan dalam kondisi darurat kesehatan, maka sebaiknya segera dilakukan realokasi anggaran untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap petani dan nelayan.

"Realokasi anggaran ter-

sebut sebaiknya diprioritaskan untuk penambahan anggaran Penguatan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian khususnya untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19," ungkapnya.

Johan memaparkan bentuk penambahan anggaran tersebut terutama untuk program Pengentasan daerah rawan pangan dan stunting dengan anggaran yang ada baru sebesar Rp344 M, serta Penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan dengan anggaran yang ada saat ini baru

sekitar Rp 188 M.

Anggota DPR RI ini juga mengkritisi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang tidak memasukkan ketersediaan dan distribusi pangan.

"Sebagai salah satu fokus penanganan dampak Covid-19 ini, padahal aspek pangan merupakan komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi situasi pandemic global penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)", ujar Johan.

Anggota FPKS DPR RI ini menjelaskan pentingnya pelaksanaan Program stabilisasi harga pangan dengan cara menjaga akurasi database harga pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen, seperti harga beras, cabe, bawang merah, bawang putih, telur, ayam ras, daging, dan lain-lain.

"Kemampuan daya beli masyarakat terutama petani dan nelayan pasti akan



menurun sebagai dampak ekonomi dari pandemic wabah virus Corona ini," pungkasnya.

Johan selaku wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengusulkan agar pagu anggaran yang perlu dipangkas atau direalokasi untuk setiap kementerian adalah anggaran yang terkait dengan koordinasi internal atau perjalanan dinas kementerian, kemudian realokasi Pembiayaan Infrastruktur serta melakukan efisiensi belanja pegawai di

setiap kementerian.

"Pemangkas anggaran tersebut sebaiknya digunakan sebagai intervensi Program bantuan pemerintah untuk keluarga petani dan nelayan selama isolasi menghadapi darurat Covid-19, terutama bantuan pangan dan kebutuhan hidup lainnya karena di desa-desa situasinya sudah tanggap darurat," tegas Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id | Foto : dpr.go.id

# DPR dan Pemerintah Akan Halangi Free Rider pada Implementasi Perpu 1/2020

Saya berharap, tidak ada lagi tambahan hutang luar Negeri. Potensi tambahan anggaran dari dalam negeri sangat besar. Bahkan dari denda Kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 18 Triliun. Ada satu perusahaan, yang mesti di eksekusi dendanya sebesar 16 T akibat pelanggaran karhutla”

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (02/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menanggapi telah ditanda tanganiya perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), bersama seluruh anggota DPR RI akan melakukan pengawasan dengan ketat implementasi perpu ini.

“Anggaran sebesar Rp

405,1 Triliun untuk menjalankan perpu ini telah di akui oleh menteri keuangan pada konferensi pers 1 April lalu, akan memicu munculnya free rider yang mendompleng. Dompleng para pemburu rente APBN ini mesti di cegah dengan melakukan pengawasan dan akuntabilitas yang ketat dari DPR RI”, tukas Akmal.

Anggota DPR Komisi IV ini menyoroti pada anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun, pemerin-

tah belum menjelaskan secara detail, dimana anggaran ini berasal. Kinerja DPR pada tugas Perpu ini, akan menjadi efektif manakala urutan pengawasannya berawal dari proses penyediaan anggaran tersebut.

Legislator Komisi IV ini merasa perlu menyampaikan darimana pengadaan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun, sebab pada Perpu no.7/2020 ini cenderung membuka pintu hutang luar negeri (pasal 2 ayat g) dan sentralisasi kekuasaan dengan memotong dana anggaran daerah (pasal 2 ayat i).

“Saya berharap, tidak ada lagi tambahan hutang luar Negeri. Potensi tambahan anggaran dari dalam negeri sangat besar. Bahkan dari denda Kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai 18 Triliun. Ada satu perusahaan, yang mesti di eksekusi dendanya sebesar 16 T akibat pelanggaran karhutla”, jelas Akmal.

Politisi PKS ini mengusulkan, perlu ada penguatan keuangan daerah untuk menanggulangi akibat



banyak rakyat kecil terdampak kebijakan social distancing, dan kini mereka kembali ke daerah masing-masing dan kehilangan sumber penghasilan. Bantuan langsung pangan perlu diperbesar dan dijalankan secara efektif menggendong lembaga-lembaga kemanusiaan sehingga biaya distribusi dapat dibantu dari sumber penggalangan dana dari masyarakat.

Akmal mengatakan, anggaran sebesar Rp 43,6 Triliun pada alokasi kartu sembako dirasa akan kurang. Tapi dengan anggaran ini ia sudah merasa optimis akan membantuk masyarakat kecil dan meneng-

ah asalkan di distribusi dengan baik sehingga para penumpang gelap pancari keuntungan di situasi yang buruk ini dihilangkan. Untuk itu, pelibatan seluruh pihak menjadi bagian fungsi pengawasan akan menjadi sangat penting dan mendasak.

“Saya berharap, implementasi perpu ini dilakukan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan. Jangan orang kaya yang malah mendapat pelayanan perpu ini. Rakyat miskin, terutama petani, nelayan dan pelaku UMKM lah yang sangat perlu mendapat dukungan perpu No. 1 tahun 2020 ini”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.

# Aleg PKS: Segera Relokasi Anggaran untuk Atasi Corona di Desa

Anggaran relokasi tersebut penggunaannya untuk upaya pencegahan melalui social distancing, karantina wilayah dan dukungan penguatan anti body melalui ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat yang rentan ekonomi dan kesehatan pada masa wabah covid-19 ini

## Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (01/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga Anggota Badan Anggaran Hermanto menyebutkan, cakupan sebaran wabah covid-19 sudah sampai ke desa terbawa oleh masyarakat perantau yang pulang kampung ke desa.

Para perantau itu, kata Hermanto, ada yang masih berstatus carrier (pembawa virus) dan ada juga yang sebenarnya sudah suspect tetapi tidak diketahui.

"Mereka datang ke desa. Di desa, mereka bersentuhan dengan masyarakat desa. Masyarakat desa itu umumnya petani, nelayan dan buruh", papar Hermanto.

Menurutnya, masyarakat yang terlibat dalam pertanian, nelayan dan buruh adalah komunitas masyarakat yg rentan ekonomi dan kesehatannya.

"Pemerintah harus merelokasi anggaran secepatnya untuk melindungi komunitas masyarakat yang rentan ini. Kecepatan penyebaran covid-19 harus diimbangi dengan kecepatan menghentikannya", tandas legislator dari FPKS ini.

Ia mengungkapkan, memang di tahun 2020 ini hampir semua Kementerian yang menjadi mitra Komisi 4 mengalami penurunan anggaran dibandingkan tahun lalu.

"Namun sekalipun

demikian masih ada mata anggaran yang bisa direlokasi untuk melindungi komunitas masyarakat yg rentan terkena serangan wabah covid-19", tutur Hermanto yang juga anggota Komisi 4 DPR ini.

Pemerintah harus bisa merelokasi anggaran Kementerian untuk melindungi masyarakat yang rentan tersebut. "Anggaran relokasi tersebut penggunaannya untuk upaya pencegahan melalui social distancing, karantina wilayah dan dukungan penguatan anti body melalui ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat yang rentan ekonomi dan kesehatan pada masa wabah covid-19 ini", paparnya.

"Petani, nelayan dan buruh punya tugas berat dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional. Karena itu Pemerintah harus memberikan jaminan kepastian ekonomi dan kesehatannya", pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Foto : dpr.go.id





## Anggaran Infrastruktur Tak Prioritas

- ✗ Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),
- ✗ Anggaran pengembangan destinasi wisata super prioritas
- ✗ Anggaran pembangunan 49 bendungan
- ✗ Anggaran pembangunan 3 bandara baru
- ✗ Anggaran pembangunan rel dan perumahan

# Alihkan!

## Anggaran Infrastruktur Tak Prioritas untuk Tangani Covid 19



Banyak bendungan dan bandara yang sudah terbangun dengan anggaran besar tapi tidak termanfaatkan. Jadi, sementara stop dulu. Dananya alihkan untuk yang lebih urgen dan dibutuhkan masyarakat

**Ir. H. Sigit Sosiantomo**

Anggota Komisi V DPR RI



# Aleg PKS: Alihkan Anggaran Infrastruktur Tak Prioritas untuk Tangani Covid 19

Banyak bendungan dan bandara yang sudah terbangun dengan anggaran besar tapi tidak termanfaatkan. Jadi, sementara stop dulu. Dananya alihkan untuk yang lebih urgen dan dibutuhkan masyarakat

## Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (01/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah mengalihkan anggaran infrastruktur yang tidak prioritas untuk penanganan covid 19.

Sigit juga meminta pemerintah tidak serampangan menambah hutang demi menutupi defisit.

"Untuk penanganan covid 19, kita optimalkan saja APBN dengan merealokasi sejumlah program yang belum prioritas. Seperti anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengembangan destinasi wisata super priortitas, dan sejumlah program infrastruktur lainnya

seperti pembangunan 49 bendungan, pembangunan 3 bandara baru, pembangunan rel dan perumahan," kata Sigit, yang juga Anggota Badan Anggaran ini.

Dalam APBN 2020, anggaran IKN dialokasikan sebesar Rp 2 triliun, pembangunan bendungan sebesar Rp 18 Triliun, pengembangan destinasi wisata sebesar Rp 6.3 triliun.

Menurut Sigit, soal pembangunan IKN sebaiknya ditunda karena sama sekali belum mendesak. Demikian juga dengan pembangunan 49 bendungan dan pembangunan

3 bandara baru. Terlebih, hasil temuan BPK tahun 2018 atas program atas pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku mendapati banyak temuan dan masalah ketidakefektifan.

Banyak bendungan dan bandara yang sudah terbangun dengan anggaran besar tapi tidak termanfaatkan. Jadi, sementara stop dulu. Dananya alihkan untuk yang lebih urgen dan dibutuhkan masyarakat," kata Sigit yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Selain mendesak realokasi APBN untuk program infrastruktur, Sigit juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menambah hutang guna menutupi defisit anggaran yang diperlebar melebihi 3%.

"Jangan menambah hutang karena akan menjadi beban. Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir. Baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri." kata Sigit.

Sebagai solusi, Sigit mendesak pemerintah untuk



memperketat pengeluaran dan melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung pada rakyat.

"Untuk menutupi defisit pemerintah bisa optimalkan APBN yang ada dengan Pemangkasan anggaran yang

tidak urgen. Program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor riil sebaiknya dikurangi." kata Sigit.

Foto : dpr.go.id

# Anggota Fraksi PKS Desak Pemerintah Segera Tetapkan Jabodetabek sebagai PSBB

Pemerintah Pusat terlambat. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah. Tapi tidak segera diikuti pembatasan pergerakan orang. Imbasnya akhirnya kian tak terkendalinya penyebaran Covid-19 selama satu bulan ini

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Bekasi (02/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhmu mendesak pemerintah segera menetapkan Jabodetabek sebagai daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal tersebut kata Syaikhmu, harus segera dilakukan untuk menghambat terjadinya penyebaran penyakit ke daerah lain.

Menurut Syaikhmu, ini mendesak sebab sampai saat ini, pemerintah masih belum menetapkan Jabodetabek sebagai PSBB. Padahal, DKI Jakarta sudah menjadi episentrum Covid-19.

"Sesegera mungkin

pemerintah harus menetapkan Jabodetabek sebagai PSBB. DKI itu episentrum Covid-19. Penyebaran virus semakin cepat dan tak terbendung," ujar Syaikhmu.

Anggota Komisi V itu memaparkan, melihat situasi saat ini, pemerintah pusat sudah selayaknya menjadikan Jabodetabek sebagai PSBB. Sebab sejauh ini terlihat jelas lambat dan kurang koordinasinya pemerintah pusat dengan daerah.

Syaikhmu mencontohkan Imbauan untuk tidak keluar rumah. Ini akhirnya tak berjalan optimal karena tidak segera

diiringi pembatasan pergerakan orang ke daerah dan juga kurangnya bantuan sosial. Padahal, imbauan tersebut menyebabkan perekonomian melambat sehingga banyak perantau di wilayah Jabodetabek memutuskan untuk pulang ke daerah. Terlambatnya mengurangi pergerakan orang ke daerah, menyebabkan penyebaran wabah yang tidak terkendali dalam waktu satu bulan ini dan sudah menyebar ke 30 provinsi.

"Pemerintah Pusat terlambat. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah. Tapi tidak segera diikuti pembatasan pergerakan orang. Imbasnya akhirnya kian tak terkendalinya penyebaran Covid-19 selama satu bulan ini," papar Syaikhmu.

Hingga saat ini, tepat satu bulan sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu, tercatat ada 1677 kasus Covid19 di 30 provinsi. Ada 157 kasus meninggal dunia atau tingkat kematiannya sekitar 9,36% jauh diatas rata-rata



dunia yang hanya sekitar 4,4 %.

Ini bisa terjadi, lanjut Syaikhmu, akibat kurangnya pengawasan terhadap orang-orang yang datang dari luar negeri dan juga karena kurangnya pembatasan pergerakan orang di dalam negeri sehingga menyebabkan terjadinya penularan lokal.

Syaikhmu juga mengungkap lambatnya penanganan wabah ini. Terbukti dari terbitnya PP No.21 Tahun 2020 yang baru dikeluarkan pada 31 Maret 2020. PP ini memuat kebijakan PSBB. Status PSBB di daerah dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kemudian setelah melalui kajian, statusnya akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, sampai dengan tanggal 1 April 2020

belum ada daerah yang ditetapkan untuk dapat menerapkan PSBB.

Di sisi lain terbit pula Surat Edaran Kepala BPTJ No.5 Tahun 2020, yang mengimbau agar Pemerintah Daerah di Jabodetabek segera mengurangi atau menghentikan pergerakan orang melalui pembatasan lalu lintas, padahal belum ada penetapan PSBB untuk wilayah Jabodetabek.

"Ini membuktikan betapa lambat dan tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah dalam merespons wabah Corona," kata Syaikhmu.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# Realokasi Anggaran 1,5 T Kemendag, Fokus Pada Harga Makanan Pokok

Keluhan para penggerak UKM ini banyak dari semakin tingginya harga bahan baku. Misal gula. Para ketua-ketua UKM banyak mengirimkan pesan WA maupun secara langsung ketika bertemu bahwa mereka sangat resah. Mestinya pemerintah mampu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menimbun atau menetapkan harga diluar kewajaran terhadap komoditas bahan pokok

## Hj. Nevi Zuairina

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (06/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina banyak mendapat keluhan dari para pelaku UKM yang bergerak di berbagai industri makanan dan minuman skala kecil.

Menurut Nevi Keluhan banyak terjadi pada tidak terkendalinya harga bahan baku sebagai komponen utama pembuatan produk makanan minuman atau sering disebut mamin.

Anggota komisi IV ini, setelah mengikuti rapat virtual dengan kementerian perdagangan mengatakan, sebaiknya ada relokasi Anggaran 1,5 Triliun rupiah di Kemendag yang dapat di Fokuskan Pada Stabilisasi Harga Pangan Pokok.

"Keluhan para penggerak UKM ini banyak dari semakin tingginya harga bahan baku.

Misal gula. Para ketua-ketua UKM banyak mengirimkan pesan WA maupun secara langsung ketika bertemu bahwa mereka sangat resah. Mestinya pemerintah mampu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menimbun atau menetapkan harga diluar kewajaran terhadap komoditas bahan pokok," kata ketua forum UMKM Sumbar ini.

"Kami ukm sekarang lagi resah Ibu. Dengan harga gula sudah mencapai 890 ribu 1 sak Ibu.", kata pelaku UKM seperti yang diceritakan Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, banyak sejumlah Izin impor yang dibuka, bahkan tanpa melalui seleksi perizinan (RIPH) dari kementerian teknis agar memperlancar proses impor produk pangan seperti produk hortikultura dan gula. Tapi pada kenyataannya, hingga saat ini produk-produk pangan masih tergolong tinggi harganya seperti bawang putih.

Bahkan, lanjut dia, harga gula pasir yang seharusnya memiliki HET gula sebesar Rp.



12.500 per KG, namun hingga kini di pasaran, masih banyak yang menjual sebesar Rp 19.000 per Kg lebih. Ia berharap, adanya relokasi Anggaran 1,5 Triliun di Kemendag, akan mampu memberi dampak Stabilisasi Harga Pangan Pokok.

Legislator Sumatera Barat ini mengatakan, bahwa adanya wabah COVID-19 saat ini sangat mempengaruhi aktifitas perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga secara langsung mempengaruhi pelaku usaha dalam negeri dan perekonomian nasional.

"Saya meminta kepada pemerintah, kondisi yang serba sulit ini agar tidak melupakan

begitu saja perdagangan luar negeri/ekspor. Program pengurangan produk yang berorientasi ekspor secara digital, promosi digital tetap dilakukan minimal bisa disiapkan agar ketika wabah corona berakhir, kegiatan langsung berjalan secara lancar secara cepat", pinta Nevi.

Selain penyampaian persoalan harga bahan pokok, Nevi menyoroti juga yang berkaitan dengan distribusi logistik. Pemerintah dan semua pelaku distribusi logistik harus mencegah adanya segolongan orang yang mencoba mencari keuntungan ditengah bencana wabah. Selengkapnya kunjungi : fraksi.pks.id

# Aleg PKS Desak Pemerintah Percepat Produksi dan Kendalikan Harga APD

Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah.

## **AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (06/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah mempercepat pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi.

Saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Kalaupun ada dipasaran, harganya sangat mahal sehingga kondisi tenaga medis saat ini kian terancam keselamatannya.

"Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit

dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah," ujar Amin Ak.

Pantauan di lapangan, rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.

Selain itu, yang juga masih sulit didapat para tenaga medis antara lain, alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang

merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.

"Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi. Mereka sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut," tegas Amin.

Oleh karena itu, lanjut Amin, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.

Dalam jangka pendek ini, Amin juga meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis.

Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Amin juga



meminta Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.

Amin menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok. Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, namun harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat.

Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi.

"Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan oleh pasien", lanjutnya.

Amin juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi menghimbau namun "memaksa" industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.

"Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian," tegasnya

## Rapat Virtual

# Rafli Minta Pemerintah Bantu Koperasi dan UMKM Terdampak Covid-19

Kita harap Pemerintah menampung semua hasil produksi UMKM, harus ada semacam sentral produksi yang dikontrol oleh pemerintah, jangan hanya memberikan modal atau stimulus, Pemerintah juga perlu ikut memasarkan

### **RAFLI**

Anggota Komisi VI DPR RI

Banda Aceh (03/04) — Rapat Kerja Komisi VI DPR - RI dengan Menteri Perindustrian beserta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berlangsung secara virtual Kamis (02/04/2020) dari ruang kerja masing-masing.

Dalam siaran rapat, Anggota DPR RI Komisi VI asal Aceh, Rafli menjadi juru bicara, menyampaikan agar sanitasi di area UMKM dipastikan steril, sebagai upaya pencegahan bahaya wabah covid -19.

"Sanitasi di area UMKM seluruh Indonesia agar

dipastikan berfasilitas steril dari potensi bahaya menularnya virus corona", pungkasnya.

Selanjutnya Politisi PKS itu meminta Pemerintah menampung hasil produksi UMKM dan proaktif membantu pemasarannya.

"Kita harap Pemerintah menampung semua hasil produksi umkm, harus ada semacam sentral produksi yang dikontrol oleh pemerintah, jangan hanya memberikan modal atau stimulus, Pemerintah juga perlu ikut memasarkan," tukasnya.

Menurut Rafli, Pemerintah

perlu segera mendata ulang Koperasi dan UKM yang redup akibat bencana covid-19.

"Kita merekomendasikan Koperasi dan UMKM yang mengalami kerugian akibat wabah corona agar di data dan mendapatkan bantuan nantinya," ujar Rafli.

Pertemuan melalui jarak jauh tersebut membahas setidaknya tiga point, yakni realokasi anggaran terkait covid-19, regulasi dan deregulasi terkait covid-19, dan aksi langsung K/L menghadapi Covid-19.



## Tabrak UU Minerba

# Anggota Fraksi PKS Minta Pemerintah Cabut Permen ESDM 7/2020

“Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tidak etis. Menteri ESDM tidak mendasari penetapan regulasi tersebut dengan etika politik. Itu Permen asal *nyelonong* di tengah kesibukan republik ini menghadapi wabah Covid 19”

### SAADIAH ULUPUTTY, S.T.

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (04/04) — Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara diam-diam mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 yang berkaitan dengan tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputty menilai, Permen ini kebablasan dan tidak etis.

Menurutnya terbitnya Permen ESDM No 7 Tahun

2020 menampakkan wajah kementerian ESDM yang tidak memahami etika politik.

“Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tidak etis. Menteri ESDM tidak mendasari penetapan regulasi tersebut dengan etika politik. Itu Permen asal *nyelonong* di tengah kesibukan republik ini menghadapi wabah Covid 19”, sebut Saadiah di Jakarta (04/04).

Sikap Saadiah menentang Permen tersebut didasari pada sejumlah kontroversi yang tercantum dalamnya.

Saadiah memcontohkan, dalam Permen ESDM No 7/2020, diatur pada pasal 105 Ayat 1 bahwa Pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan berakhir harus mengajukan permohonan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.

Lanjut Saadiah, pasal 106 ayat 2 menyebut bahwa : Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Dua pasal di atas tegas Saadiah adalah akal-akalan pemerintah.

“Jika dijalankan maka perpanjangan izin PKP2B yang



telah habis masa kontraknya cukup hanya dilakukan dengan keputusan Menteri tanpa melalui proses lelang”, imbuhnya.

Saadiah menegaskan, Permen ESDM telah menabrak UU Nomor 4 Tahun 2009 pasal 172 yang menegaskan syarat hak untuk mendapat izin perpanjangan tanpa lelang adalah hanya pemegang izin yang telah mengajukan permohonan perpanjangan setahun sebelum UU Minerba ini diberlakukan yaitu sebelum tanggal 12 Januari 2008.

“Konsekwensinya, untuk pemegang izin yang habis kontraknya setelah tanggal tersebut, permohonan perpanjangan harus melalui

lelang. Tidak bisa ujug - ujug, diatur dengan Permen lalu ujungnya tanpa lelang”, sesal Aleg Dapil Provinsi Maluku.

Fraksi PKS tandasnya, mempunyai komitmen untuk memastikan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Sehingga dirinya meminta agar pemerintah mencabut Permen No 7/2020. “Permen ini diterbitkan dengan menabrak UU Minerba. Harus dicabut. Proses perpanjangan PKP2B harus mengikuti prosedur. Termasuk memberi prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk mendapatkan IUPK”, tegas aleg dari Dapil Maluku

# Aleg PKS Minta Kementerian ESDM Segera Terbitkan Permen Listrik Gratis

Permen ini diperlukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), selaku operator listrik, sebagai dasar hukum pemberlakuan tarif listrik gratis bagi pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% bagi pelanggan listrik 900 VA, selama 3 bulan. Selama Permen tersebut belum diterbitkan kebijakan listrik gratis tidak dapat dilaksanakan

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (02/04) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, meminta Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) segera membuat Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur prosedur pelaksanaan pembebasan dan diskon tarif listrik terkait status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Mulyanto, Permen ini diperlukan PT Perusahaan Listrik Negara

(PLN), selaku operator listrik, sebagai dasar hukum pemberlakuan tarif listrik gratis bagi pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% bagi pelanggan listrik 900 VA, selama 3 bulan. "Selama Permen tersebut belum diterbitkan kebijakan listrik gratis tidak dapat dilaksanakan," ungkapnya.

Mulyanto mengingatkan, Permen dibuat secara rinci dan jelas agar tidak ada salah pengertian dalam penerapan

kebijakan di lapangan. Sehingga kebijakan diskon dan pembebasan tarif listrik dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

"Info tentang diskon dan pembebasan tarif listrik ini sudah ditetapkan oleh Presiden dan diketahui oleh masyarakat. Karena itu ESDM dan PLN harus benar-benar bisa mewujudkannya. Jangan sekedar janji yang akhirnya membuat masyarakat kecewa," ujar Mulyanto menjelang pelaksanaan rapat paripurna DPR-RI secara virtual, Kamis (02/04).

Mulyanto tidak ingin masalah relaksasi tarif listrik ini simpang siur seperti yang terjadi pada iuran BPJS. Meskipun Mahkamah Agung sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS tapi kenyataan di lapangan besaran iuran BPJS masih belum berubah.

Mulyanto khawatir jika kesimpangsiuran itu terjadi akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan dasar dilaksanakannya



PSBB, yaitu ingin menciptakan situasi tertib dan tenang dalam menghadapi wabah Covid 19.

"ESDM dan PLN harus mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Jelaskan bagaimana syarat dan ketentuan, serta prosedur pelaksanaan diskon dan pembebasan iuran listrik ini kepada pelanggan, baik

pelanggan pascabayar maupun yang prabayar. Jika perlu buat pemberitahuan melalui sarana media sosial dengan

menampilkan info grafis yang mudah dipahami masyarakat," tandas anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Banten 3 ini.

Foto : dpr.go.id

# Anggota Fraksi PKS: Kemenag Siapkan Langkah Jika Haji Batal Tahun ini

Kemenag RI saat ini harus pro aktif membangun komunikasi kepada calon jemaah haji, siapkan langkah-langkah teknis untuk penyelesaian masalah-masalah dan skenario terburuk yang dimungkinkan akan muncul kedepannya. Sebab pelaksanaan haji ini ada kemungkinan untuk ditunda keberangkatannya diakibatkan wabah corona yang masih melanda di seluruh dunia

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (05/04) – Wabah covid-19 di Indonesia per hari ini sudah mencapai 2.092 orang yang positif, dan dari angka tersebut 191 orang dinyatakan meninggal dunia.

Jika melihat data global pandemik ini di seluruh negara, tercatat hari ini ada 1.100.283 orang, dan dari angka tersebut 58.929 orang dinyatakan meninggal dunia.

Hal ini membuat banyak

ketidakpastian global di masa mendatang, mulai dari perekonomian, politik, dan rencana kegiatan-kegiatan.

Termasuk ibadah Haji, dimana merupakan ibadah wajib bagi setiap umat muslim di seluruh penjuru dunia.

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan qolba lubis mengatakan bahwa saat ini kita masuk pada zaman dimana semuanya serba tidak

pasti.

"perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengalami kerugian akibat wabah ini, sosial-ekonomi dunia juga merasakan dampaknya, bahkan dalam beribadah pun kita harus mengambil fiqh yang menjauhkan sisi mudharat didalamnya (dilar dari kebiasaan)," ungkapnya.

Beberapa pekan terakhir, lanjut Iskan, umat muslim khususnya di Indonesia dan diberberapa tempat, meniadakan shalat jumat berjamaah, tiada lain untuk memutus rantai penyebaran wabah ini secara meluas.

"Baru-baru ini, menteri haji dan umroh Arab Saudi, Muhammad Saleh bin Taher memberikan isyarat bahwa haji tahun ini kemungkinan dibatalkan, dengan menyatakan untuk sementara menunda segala jenis kontrak yang ada tentang pelaksanaan ibadah Haji sampai ada kejelasan atas wabah corona ini," pungkasnya.

Iskan menghimbau kepada Kemenag RI bahwa hal tersebut



mengisyaratkan ibadah haji kemungkinan bisa jadi batal tahun ini.

"Dua hari yang lalu mekkah dan madinah resmi positif dan 21 diantaranya meninggal dunia di Arab Saudi, maka wajar saja pemerintah Arab sudi membuat langkah-langkah preventif bagi negaranya, seperti menunda segala jenis kontrak sampai keadaan yang betul-betul jelas," tutur iskan.

Selain itu, Politisi PKS ini menekankan Kemenag RI saat ini harus pro aktif membangun komunikasi kepada calon jemaah haji, siapkan langkah-langkah teknis untuk penyelesaian masalah-masalah dan

skenario terburuk yang dimungkinkan akan muncul kedepannya.

"Sebab pelaksanaan haji ini ada kemungkinan untuk ditunda keberangkatannya diakibatkan wabah corona yang masih melanda di seluruh dunia."

Iskan juga menambahkan pemerintah dalam hal ini Kemenag RI harus segera melakukan langkah mitigasi dalam menangani hal ini, jangan sampai calon jemaah haji nantinya dirugikan.

"Sudah ditunda keberangkatannya, uang mereka pun ikut dipotong, Saya tidak ingin ada pemotongan yang dibebankan kepada calon jemaah haji nantinya," tutup Iskan

## Imbas Covid-19

# Nurhasan Zaidi: Segera Cairkan Dana Bansos Masyarakat Terdampak

kita mendesak Kementerian Sosial untuk segera mengajukan skema program dampak sosial dari Covid 19 ini. Kita juga minta pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dipercepat. Tadi Komisi VII juga sepakat mendesak pemerintah agar dibuat program seperti BLT bagi mereka yang terdampak”

## H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (31/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, meminta Kemensos untuk melakukan percepatan pencairan dana bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako ditengah kondisi Covid-19 yang sangat berdampak pada masyarakat kurang mampu. Hal itu disampaikan Nurhasan setelah meng-

ikuti rapat internal virtual Komisi VIII di Jakarta (31/03/20).

“Covid-19 ini menyisakan dampak sosial ekonomi yang mulai terasa, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian dan kalangan yang bekerja di sektor informal apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi

mutus mata rantai penyebarannya,” ungkapnya.

“Untuk itu kita mendesak Kementerian Sosial untuk segera mengajukan skema program dampak sosial dari Covid 19 ini. Kita juga minta pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako dipercepat. Tadi Komisi VII juga sepakat mendesak pemerintah agar dibuat program seperti BLT bagi mereka yang terdampak”, lanjutnya.

Legislator PKS dari daerah pemilihan Jabar IX ini menegaskan bahwa fokus kerja Komisi VIII yang membidangi sosial, agama, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa sidang ini adalah membantu percepatan penanganan wabah Covid 19 dan mengantisipasi dampak sosial nya.

“Kita sesalkan sikap pemerintah diawal yang cenderung lambat, tidak fokus dan over confident, padahal



wabah Covid-19 ini tidak terlihat dan pergerakannya begitu cepat. Untuk itu Komisi VIII akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga. Fokus kita adalah percepatan penanganan Covid-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNBP, mitra kita. Kita akan sisir

anggaran kementerian untuk di realokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif Covid 19”, pungkasnya.

## MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

# Mufida: Hak Peserta Wajib Dipenuhi

Selama ini kan masih belum jelas. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah atau dari penyelenggara BPJS Kesehatan, tentang kelanjutan keputusan MA tersebut dan kalo berlaku surut, bagaimana iuran yang sudah dibayarkan peserta?"

### Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (02/04) — Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus segera mengeluarkan pernyataan resmi tentang pemberlakuan iuran BPJS ke tarif lama.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, dalam situasi serba sulit akibat pandemi corona (Covid-19) ini, rakyat butuh kabar-kabar gembira.

"Selama ini kan masih belum jelas. Belum ada pernyataan resmi dari

pemerintah atau dari penyelenggara BPJS Kesehatan, tentang kelanjutan keputusan MA tersebut dan kalo berlaku surut, bagaimana iuran yang sudah dibayarkan peserta?" ujar Mufida.

Sebagaimana diketahui, MA mengabulkan judicial review atas Perpres 75/2020 pada awal Maret 2020, menyusul gugatan yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

Perpres yang digugat itu mengatur kenaikan dua kali

lipat iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Dengan Peprres itu, iuran peserta kelas mandiri I melonjak dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per bulan.

Lalu, kelas mandiri II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per bulan. Sedang kelas mandiri III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per bulan.

Menurut Mufida, sejak Januari hingga Maret, para peserta BPJS Kesehatan telah membayar sesuai tarif baru tersebut.

"Dengan keputusan MA itu, bagaimana kelebihan bayar selama 3 bulan yang lalu?" tanya Mufida.

Dicontohkan, peserta kelas Mandiri I dalam sebulan telah membayar kelebihan sebesar Rp 80 ribu. Berarti selama 3 bulan membayar dengan tarif baru, berarti ada kelebihan Rp. 240 ribu.

"BPJS harus segera secara resmi menyampaikan kepada para peserta BPJS Kesehatan teknis berlakunya iuran yang lama. Saya gak habis pikir, ternyata per 1 April tagihan iuran BPJS masih dengan tarif yang naik itu," tandas Mufida.



Keputusan MA ini bersifat mengikat dan sudah dikeluarkan serta diumumkan pada 27 Februari 2020.

"Harusnya sejak pengumuman MA, BPJS Kesehatan melakukan segera persiapan teknis kembalinya iuran BPJS ke tarif lama, termasuk sistem tagihan online-

nya," tegas Mufida.

Sungguh rakyat sangat dikecewakan dengan masih berlakunya tarif naik yang ditagihkan per 1 April kemarin. BPJS harus bertanggung jawab. MA adalah lembaga terhormat, harus dipatuhi keputusannya," tambah Mufida.

## Besarnya Kewenangan Anggaran Covid-19,

# Netty Minta Pemerintah Transparan dan Akuntabel

Meski sudah ada Perppu sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada kewenangan DPR yang kurang diindahkan pemerintah, seperti pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, penentuan program dan lain-lain. Jangan sampai alasan kedaruratan menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Bandung (05/04) — Pemerintah telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat covid-19 dengan mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani menanggapi bahwa rakyat sudah lama menanti keputusan pemerintah.

"Pemerintah harus segera ambil langkah sigap, cepat, dan

tidak ragu-ragu melakukan antisipasi. Kenapa harus menunggu desakan baru ditetapkan?" tanya Netty.

Sebagaimana diketahui, keputusan ini dibarengi dengan kesiapan Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 405,1 Triliun dengan alokasi pemulihan ekonomi nasional Rp. 150 T, stimulus perpajakan dan kredit usaha rakyat Rp. 70,1 T, jaring

pengaman sosial sebesar Rp 110 T sementara porsi anggaran kesehatan Rp. 75 Triliun atau sekitar 18,5 persen dari total anggaran.

Netty mempertanyakan persentasi alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat.

"Alokasi untuk kesehatan seharusnya mendapat porsi lebih besar. Apakah dengan angka 75 triliun ini, pemerintah sudah menghitung dengan benar kebutuhan lapangan?

Bukankah kita tahu banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan mengeluhkan kurang dan langkanya APD, masker, serta alat dan bahan lainnya? Belum lagi soal minimnya ruang isolasi di rumah sakit dan dukungan moral yang harus diberikan pada para tenaga kesehatan," terang Netty.

Menurut Netty, pemerintah perlu memerhatikan bahwa per 5 April, penduduk yang positif corona ada 2.273 kasus, 164 sembuh, 198 meninggal dunia. Dari jumlah itu, tercatat 19 dokter dan 5 dokter gigi meninggal dunia, belum tenaga kesehatan lainnya. Dan berdasarkan prediksi Badan



Intelejen Negara (BIN), jumlah ini akan terus meningkat.

"Mengapa sektor ekonomi yang diprioritaskan, ada apa ini? Saya pikir sekarang fokus dulu pada penanganan krisis di bidang kesehatan. Kita bangun pemulihan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berpihak pada ekonomi kerakyatan setelah badai berlalu," ujarnya.

Legislator anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar tetap memerhatikan mekanisme pembahasan realokasi APBN.

"Meski sudah ada Perppu sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada

kewenangan DPR yang kurang diindahkan pemerintah, seperti pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, penentuan program dan lain-lain. Jangan sampai alasan kedaruratan menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial," sesal Netty.

Terkait permasalahan tersebut, Netty menggarisbawahi tentang pentingnya pengawasan implementasi program dan anggaran.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id | Foto : dpr.go.id

# 65% LEBIH

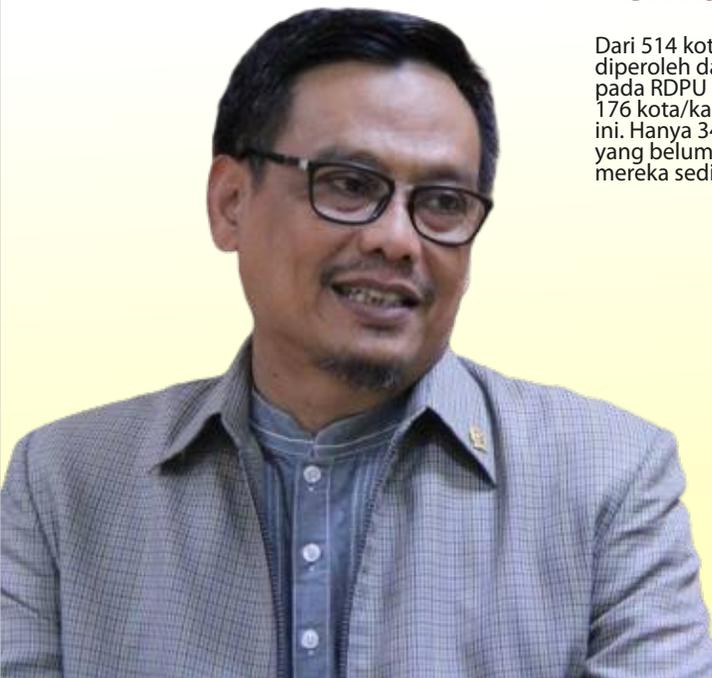
## daerah belum menjangkau materi Pembelajaran

Dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu, terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini. Hanya 34,5% yang terakses, berarti ada 65% lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan

“Pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI



# Fikri Desak Pemerintah Penuhi Pendidikan Siswa Tak Terakses Internet

Pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan

Jakarta (05/04) — Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS mendesak pemerintah agar memenuhi kebutuhan pembelajaran pelajar seluruh Indonesia di tengah wabah Covid 19 ini.

“Hanya sekitar 34,5% yang bisa mengakses layanan pendidikan online,” ujarnya di Semarang (4/4).

Di tengah wabah Covid 19 ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan wabah tersebut. Per hari ini (4/4), jumlah kasus positif sebanyak 1986 kasus dan 181 di antaranya meninggal dunia.

Fikri menilai, kebijakan PSBB sudah tepat dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus

yang lebih massif.

“Termasuk di institusi pendidikan yang memang tempat banyak orang berkumpul. Sudah tepat jika diliburkan, tetapi harus ada pengganti agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat tetap berjalan,” ujar anggota dari Fraksi PKS ini.

Ia menuturkan, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu, terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini.

“Hanya 34,5% yang terakses, berarti ada 65% lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan,” tambah Fikri.

Dengan persentase

tersebut, dari 43,5 juta pelajar se-Indonesia, hanya sekitar 10 juta siswa yang mengakses materi pembelajaran dari platform online. “Ada 33,5 juta siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran,” sambungnya.

“Pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan,” desak legislator yang pernah menjadi kepala sekolah ini.

Meski UN sudah ditiadakan dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, Fikri menilai semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid 19 dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat memperoleh haknya di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja.



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Hanya 34,5% yang terakses, berarti ada 65% lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan

# Junaidi Auly: Aji Mumpung Perppu 1/2020, Pajak Korporasi Dipotong

munculnya konten stimulus pajak pada Perppu tersebut tidak diduga sebelumnya. Karena memang akan dibicarakan pada omnibus law perpajakan. Jika dikaitkan dengan keuangan negara, tentu dampaknya sangat berpengaruh signifikan pada keuangan negara ke depan

## Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (05/04) — Perppu No.1 Tahun 2020 memberikan beberapa stimulus bagi ekonomi. Salah satunya adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Dengan demikian tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak tersebut adalah menjadi (a) sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan (b) sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun Pajak

2022.

Ada tambahan potongan bagi wajib pajak dalam negeri, yang memenuhi ketentuan: (i) berbentuk Perseroan Terbuka; (ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (iii) memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa munculnya konten stimulus pajak pada Perppu tersebut tidak diduga sebelumnya.

"Karena memang akan dibicarakan pada omnibus law perpajakan. Jika dikaitkan dengan keuangan negara, tentu dampaknya sangat berpengaruh signifikan pada keuangan negara ke depan," jelas Junaidi.

Menurut Junaidi, penurunan tarif pajak adalah suatu keputusan yang kurang tepat, apalagi saat ini penerimaan perpajakan selalu meleset (shortfall). Kondisi itu menyebabkan menumpuknya utang tiap tahun.

"Kalau tarifnya terus dikurangi, apakah ada jaminan kegiatan ekonomi semakin tumbuh atau setidaknya kepatuhan dunia usaha membayar pajak semakin baik?" tanya Junaidi.

"Pertanyaan berikutnya, apakah penurunan tarif tersebut menjadi stimulus bagi investasi baru? Karena selama ini masalah yang dihadapi investor lebih didominasi oleh inefisiensi birokrasi. Tarif pajak adalah masalah kesekian dari tumpukan masalah lainnya", tutup Junaidi.



# Jaga Pasokan Kebutuhan Pokok, Agar Tak Terjadi Lonjakan Harga

“Pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Kelancaran distribusinya harus dijamin pemerintah dan aparat keamanan. Tidak boleh ada siapapun yang menghambat distribusi dan pasokan kebutuhan pokok”

## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (31/03) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Eky Awal Mucharam menekankan perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok ditengah penetapan pembatasan sosial skala besar oleh pemerintah pusat dan banyaknya pemerintah daerah yang menutup wilayahnya.

“Pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Kelancaran distribusinya harus dijamin pemerintah dan aparat keamanan

tidak boleh ada siapapun yang menghambat distribusi dan pasokan kebutuhan pokok”, tegasnya menanggapi perkembangan saat ini.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 6.000 ton telur masih tertahan di gudang produsen di Jawa Timur dan Jawa Tengah akibat kebijakan penutupan wilayah oleh masing-masing daerah. Telur-telur tersebut saat ini tidak bisa didistribusikan ke pedagang sehingga sulit diserap pasar. Jumlah tersebut adalah hitungan produksi sehari. Sementara, ini sudah tujuh hari daerah-daerah

banyak yang menutup wilayah sehingga stok telur masih tertahan. Telur-telur tersebut rencananya akan dikirimkan ke Jawa Barat dan DKI Jakarta. Menurut kelompok Presidium Peternak, saat ini distribusi pengiriman ke dua provinsi itu paling terhambat lantaran beberapa lokasi telah melakukan isolasi wilayah.

“Penurunan pasokan telur dan keluhan pemasok yang tidak bisa melakukan pengiriman sehingga stok menumpuk di gudang Jatim dan Jateng harus diperhatikan. Terjadinya penumpukan pasokan di gudang akan merugikan peternak. Lebih jauh yang dikhawatirkan akan membuat pasokan telur di Jakarta dan Jawa Barat menjadi langka. Ini akan mendorong harga. Kita khawatir kalau ini juga terjadi pada komoditas yang lain. Ini harus mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat keamanan”, imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mendesak pemerintah memberikan kejelasan terkait



kebijakan penutupan wilayah supaya terdapat aturan yang jelas.

“Kita medesak agar ada protokol yang jelas untuk pengiriman pasokan kebutuhan pokok dan barang-barang. Distribusi logistik ke daerah-daerah harus dipastikan aman dan kalau diperlukan harus dikawal petugas. Pemerintah daerah perlu membuat atau memperkuat depo-depo logistik, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Karena masa darurat cukup lama, dengan begitu rantai pasokan dari produsen ke masyarakat akan aman”, tambahnya.

Menurut sejumlah sumber selain karena penutupan wilayah, sulitnya distribusi

logistik juga diakibatkan oleh tutupnya sejumlah pasar dan juga sejumlah sopir telah menolok tugas karena khawatir terpapar virus corona.

“Pemerintah juga harus siapkan armada pasokan alternatif kalau sopir dan pengusaha logistiknya berkurang kapasitas dan mobilitasnya. Kasus pasokan telur ini jangan sampai merebet pada pasokan kebutuhan pokok yang lain”, tegasnya.

Menurutnya kasus ini harus jadi sinyal dan warning penting agar dimanage lebih baik.

“Sudah terlihat muncul ada masalah dilapangan terkait distribusi pasokan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id | Foto : dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# RUU Omnibus Law dan Ibukota Baru **TIDAK LAYAK** dibahas dalam situasi seperti sekarang

Negara tidak boleh setengah hati dalam menangani pandemi covid 19. Omnibus Law dan Ibu Kota Baru tidak layak dibahas ditengah situasi rakyat membutuhkan kehadiran negara. Kerahkan segala upaya untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Keselamatan rakyat lebih utama

**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI



# Rumah Warga Curugkembar Kebakaran

## Aleg PKS Sumbangkan Bahan Bangunan

Semoga sedikitnya bantuan ini bisa meringankan beban warga tersebut. Terutama juga semoga rumahnya bisa segera dibangun kembali. Bagi masyarakat yang mau berdonasi, dipersilahkan

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (05/04) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, mengunjungi lokasi rumah warga yang mengalami musibah kebakaran di Kampung Cibinong Desa Bojontugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/03/2020).

"Tentu ini adalah ujian bagi keluarga yang mengalami kebakaran tersebut. Terlebih, situasi kita saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19," ucap Slamet.

Rumah yang mengalami kebakaran tersebut merupakan rumah milik H Mahmud yang

ditempati oleh ia dan istri serta anaknya yang berusia 19 tahun. Penyebab kebakaran, diketahui berasal dari korsleting listrik. Kebakaran terjadi pada Minggu (29/3/2020) pagi.

Sebagai bentuk rasa kepedulian kepada warga yang mengalami musibah kebakaran tersebut, Slamet berkesempatan memberi sumbangan bantuan berupa bahan material bangunan dan sejumlah pakaian.

"Semoga sedikitnya bantuan ini bisa meringankan beban warga tersebut. Terutama juga semoga rumahnya bisa segera dibangun

kembali. Bagi masyarakat yang mau berdonasi, dipersilahkan," tutup Slamet.

Sementara itu, Mahmud mengungkapkan, dirinya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Slamet. Mahmud menyebut, saat ini ia dan keluarganya tinggal bersama orang tuanya.

"Sangat berterima kasih dikarenakan baru ada yang membantu untuk bahan bangunan terutamanya. Semuanya terbakar ludes, tidak ada yg tersisa, hanya baju yang menempel," ungkapnya



## Atasi Penyebaran Covid 19

# Toriq: Pejabat Publik Harus Beri Contoh Baik

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu, Kami yang merupakan bagian dari DMI berupaya menjadikan lingkungan mesjid bersih dan steril dari penyebaran virus corona.

### KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Tasikmalaya (31/03) — Dewan Masjid Jami Al-Fatah melaksanakan gerakan penyemprotan cairan disinfektan di masjid Jami Al-Fatah, Kampung Leles Kidul Desa Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

“Kegiatan gerakan penyemprotan cairan disinfektan dilaksanakan atas arahan Ketua Dewan masjid Indonesia (DMI) yang minggu lalu melau-ching gerakan penyemprotan cairan disinfektan ke sepuluh ribu masjid di Indonesia “ jelas Toriq Hidayat anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Gerakan Penyemprotan ini dipimpin langsung Kepala Desa Leles Kidul didampingi seluruh pengurus masjid Al-Fatah, dan

ikut serta didalamnya Anggota DPR RI Komisi I DPR RI, Jumat (27/03/2020).

Toriq mengatakan, gerakan penyemprotan disinfektan ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona di lingkungan masjid.

“Penyebaran virus corona terjadi di tempat keramaian, masjid salah satu tempat orang banyak berkumpul,” katanya.

Menurut Toriq, lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu, Kami yang merupakan bagian dari DMI berupaya menjadikan lingkungan mesjid bersih dan steril dari penyebaran virus corona.

“Kepada masyarakat yang ingin sholat ke masjid agar

mengikuti arahan pengurus mesjid Al-Fatah yakni membawa sejadah sendiri dari rumah masing-masing dan Social Distancing menjaga jarak antara jamaah sholat,” imbua Toriq.

Ketika ditanyakan tentang kondisi kesehatan saat ini beliau menyampaikan saya dan keluarga dalam keadaan sehat.

“Alhamdulillah sehat-sehat, kami lebih banyak di rumah, keluar sangat dibatasi kecuali untuk keperluan darurat. Kami harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar,” jawab Toriq.

Pemerintah telah memberikan arahan kepada masyarakat dalam upaya menanggulangi wabah ini terutama bagi yang belum terkena. Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab saya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat dan memberikan contoh pelaksanaannya,” tambah Toriq.



# Ringankan Beban Warga Terdampak Covid-19, Adang Daradjatun Berbagi Sembako

Pembagian sembako ini dilakukan sesuai dengan arahan Fraksi PKS, agar setiap Anggota Daradjatun membantu masyarakat yang membutuhkan disaat pandemi

## **Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta III

Jakarta (04/04) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Daradjatun membagikan sejumlah sembako di Daerah Pemilihannya (Dapil), Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakilpolri ini menyampaikan kepeduliannya terhadap warga terdampak Covid-19 ini.

"Pembagian sembako ini dilakukan sesuai dengan

arahan Fraksi PKS, agar setiap Anggota berpartisipasi membantu masyarakat yang membutuhkan disaat pandemi", ungkap Wakil Fraksi PKS bidang Kinerja ini.

Lebih lanjut Adang berharap, upaya ini bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak dengan mewabahnya virus Corona di berbagai wilayah.

"Harapan saya semoga yang diberikan ini, bisa membantu bapak dan ibu

warga Jakarta, yang penghasilannya menurun drastis selama merebaknya Covid-19 ini," terangnya.

Perlu diketahui bahwa dalam satu hari, Adang Daradjatun memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan di dua tempat yakni di Balai Warga Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di Kantor DPC PKS Tanjung Priok, Jakarta Utara.





الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا  
أنا لله وانا اليه راجعون

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah  
Pengasuh Ponpes YAPIDH Bekasi

## **Dr. KH. AHZAMI SAMIUN JAZULI, MA**

Pada Ahad 5 April 2020, pk. 06.30 WIB

Semoga Allah SWT menerima seluruh  
amal ibadahnya. serta diampuni  
segala dosanya Amin



**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



## PROFIL

## H. HIDAYATULLAH, S.E



# Jadikan keluarga VISI MENGGAPAI SURGA

Kali ini kita akan berkenan dengan Anggota Fraksi PKS DPR RI H. Hidayatullah, SE. Meski lahir di Malaysia, 24 Oktober 1961, namun beliau tumbuh dan besar sebagai anak Medan. Horas! Sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelum diamankan menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara I yang meliputi Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi. Hidayatullah telah bertahun-tahun menjadi anggota DPRD baik di tingkat

Provinsi maupun Kabupaten. Bahkan, Nama Hidayatullah turut menjadi satu dari lima bakal calon Wali Kota Medan periode 2021-2026 dari Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Kota Medan 2020.

Hidayatullah saat ini diamankan di Komisi XI, yang membidangi keuangan dan moneter. Bukan tanpa alasan, karena beliau punya pengalaman panjang dalam bidang perbankan dan keuangan. Tercatat pernah menjadi Direktur PT. BPRS Al-Washliyah (1999-2004) dan Koperasi Berkah Mandiri sebagai Pengurus (2016-

sekarang).

Hidayatullah memiliki 6 anak, buah cinta pernikahan dengan Hj Hamidah Muhaimein Saragi Siallagan, wanita Batak asal Kota Tanjung Balai Sumatera utara yang dipinangnya 32 tahun lalu. Keluarga menjadi suluh asa yang tidak pernah lekang menjadi motivasi bagi Pria 58 tahun ini.

Pesan Hidayatullah untuk keluarga Indonesia \*jadilah keluarga dengan visi besar meraih kebahagiaan dengan berkumpul di surga Allah yang hanya bisa ditempuh dengan menjadi keluarga yang

senantiasa berbuat baik kepada sesama tanpa berbuat kerusakan\*

### SOCMED

Facebook :  
Haji Hidayatullah SE

Twitter :  
@abumohafiy

Instagram :  
@h\_hidayatullah\_se



jadilah keluarga dengan visi besar meraih kebahagiaan dengan berkumpul di surga Allah yang hanya bisa ditempuh dengan menjadi keluarga yang senantiasa berbuat baik kepada sesama tanpa berbuat kerusakan



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)